

Bagian 1

Urgensi Indikator Pembangunan Ekonomi

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk manifestasi keberhasilan didalam meningkatkan tingkat GNP suatu negara pada periode tertentu melalui sector-sektor yang berpeluang. Pemikiran yang demikian

akan memunculkan teori pertumbuhan dan pembangunan sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi, sebagai contoh Program MP3EI, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan perekonomian Indonesia dapat menjadi lebih terarah sesuai dengan rencana dan tepat sasaran untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimum sehingga terciptanya masyarakat yang happiness dengan indikator tingkat kesejahteraan.

Indikator perubahan pembangunan terjadi akibat dari perubahan pola pikir dari para ekonom dan sebagai tuntutan perubahan zaman dalam visi 2025. Perubahan paradigma pembangunan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpedoman pada tingkat GNP sebagai sasaran pembangunan tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas pembangunan, pada saat inilah mulai mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dari rencana pembangunan. Pandangan dari ekonom mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan negara berkembang dikenal dengan istilah ekonomi pembangunan yang masuk dalam analisis makro ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kinerja pemerintah untuk selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan

dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik. Pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan energi, pangan, transportasi, air bersih, sanitasi, kesehatan, telekomunikasi, infrastruktur secara berkelanjutan (*sustainable development*), dan sesuai asas berkeadilan (*growth with distribution*).

Pembangunan ekonomi Indonesia harus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa agar keluar sebagai pemenang dalam persaingan global. Selain itu, didalam proses pembangunan dituntut semakin besar dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna (*appropriate technology*) di semua aspek pembangunan ekonomi. Untuk menunjang visi 2025 Pemerintah Indonesia juga meningkatkan peran pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kemakmuran global yang berperan sebagai standar ukuran pembangunan (*basic need development*).

Keberhasilan pembangunan suatu negara diperlukan tolak ukur dengan indikator sesuai dengan definisi dari ekonomi pembangunan itu sendiri, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Indikatornya adalah tingkat pendapatan harus seimbang

dengan pengeluaran dan harus seimbang pula dengan tingkat produksi ($\text{Production} = \text{Income} = \text{Expenditure}$) indikator tersebut diharapkan diharapkan mampu mewakili atau merupakan model dari semua aspek atas pembangunan ekonomi.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja perekonomian di Kabupaten Jayapura diperlukan indikator makro yang bisa digunakan untuk menilai kinerja perekonomian. Salah satu indikator makro yang bisa digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dan dapat juga menggambarkan struktur ekonomi serta menggambarkan kinerja perekonomian. Mengingat pentingnya ketersediaan data dalam analisis perekonomian regional, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura berkerjasama dalam menerbitkan buku Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jayapura

Guna mewujudkan harapan tersebut, maka dianggap perlu melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam tentang indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jayapura sebagai dasar ataupun referensi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penentuan kebijakan

serta penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran ke depan.

Melalui Kajian Indikator Pembangunan Ekonomi yang dilakukan oleh Bappeda mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar tahun 2018, ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara detail tentang kondisi perekonomian sesuai kondisi karakteristik kawasan, potensi sumber daya alam, Sumber daya Manusia, daya dukung lingkungan, daya dukung infrastruktur dan kondisi sosial budaya masyarakat serta kendala maupun hambatan yang ada pada kawasan pengembangan perekonomian.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan

agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Mengingat pentingnya ketersediaan data dalam analisis perekonomian regional, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura berkerjasama dalam menerbitkan buku Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jayapura.

B. Tujuan

1. Untuk menggambarkan indikator perekonomian regional sebagai hasil pembangunan yang telah dicapai sehingga pelaku ekonomi baik dari Pemerintah dan masyarakat dapat menilai sejauh mana peran serta mereka dalam pembangunan di daerah Kabupaten Jayapura.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis sector apa saja yang menjadi unggulan di Kabupaten Jayapura
3. Menganalisis struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura untuk menyusun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

C. Manfaat Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan analisis dan pengkajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan/referensi

bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura.

D. Output

Beberapa keluaran (output) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pengkajian ini, antara lain:

1. Gambaran umum perekonomian di Kabupaten Jayapura.
2. Sektor basis atau potensial Kabupaten Jayapura yang menyajikan perbandingan relative antara kemampuan sektor Kabupaten Jayapura dengan kemampuan sektor yang sama di Provinsi Papua.
3. Model pertumbuhan ekonomi wilayah berdasarkan peningkatan produksi atau nilai tambah sektor usaha di Kabupaten Jayapura

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan ini adalah Kajian Indeks Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Jayapura sebagai upaya penyediaan informasi pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Jayapura ke depan, melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder pada instansi/lembaga terkait serta berbagai sumber informasi pendukung yang lain.
2. Pengumpulan data primer melalui survey lapangan, wawancara dan quisioner dengan para responden di lapangan.
3. Kajian dan analisis terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
4. Presentase Awal dan Akhir kepada stakeholder tentang hasil Kajian Pemetaan Potensi Agropolitan serta Penyerahan Dokumen Kajian.

Bagian 2

Landasan Teori

A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor

primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pengetahuan tentang tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat memerlukan penyajian statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala. Hal ini penting untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi.

Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, penge-

luaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

B. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

C. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan Negara-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-

kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking). Demikianlah, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Namun demikian, konsepsi pembangunan yang dikemukakan di atas sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi diberbagai negara dan wilayah lain, dikemukakan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, pengelolaan

public good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan. Kelemahan itulah yang menjadi penyebab hambatan terhadap gerakan maupun aliran penduduk, barang dan jasa, prestasi, dan keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) di dalamnya. Seluruh sumberdaya ekonomi dan non-ekonomi menjadi terdistorsi alirannya sehingga *divergence* menjadi makin parah. Akibatnya, hasil pembangunan menjadi mudah ditemukan antar wilayah, sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi. Implisit, juga terjadi *dichotomy* antar waktu dicerminkan oleh ketidakpercayaan terhadap sumberdaya saat ini karena penuh dengan berbagai resiko (high inter temporal opportunity cost). Keadaan ini bukan saja jauh dari nilai-nilai moral tapi juga cerminan dari kehancuran (in sustainability). Ikut main di dalam permasalahan di atas adalah mekanisme pasar yang beroperasi tanpa batas. Perilaku ini tidak mampu dihambat karena beroperasi sangat massif, terus-menerus, dan dapat diterima oleh logika ekonomi disamping didukung oleh kebanyakan kebijakan ekonomi secara sistematis.

Kecendrungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses

pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteks ini diperlukan "strategi berperang" modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D'Aveni, 1995), pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

D. Pengertian Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan.

Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya

yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan

perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti

pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke aterialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan

yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* mengemukakan, "Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan."

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

E. Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004).

Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran.

Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000), yaitu; ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup; harga diri (*self esteem*) yaitu pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. Kemudian, *freedom from servitude* yaitu kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna

pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (*economic development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ini lah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan

perubahan (growth with change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.

Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production

centered development (Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people-centered development* atau *penting people first* (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-*

reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003).

Paradigma dimaksud di atas, secara ringkas dapat dirangkum bahwa para proponent strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari pertumbuhan”, pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan) namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah.

Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan.

Pembangunan “mandiri” telah muncul sebagai konsep strategis dalam forum internasional sebelum konsep “Tata Ekonomi Dunia Baru” (NIEO) lahir dan menawarkan anjuran kerja sama yang menarik dibanding menarik diri dari percaturan global.

Pentingnya strategi *ecodevelopment*, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; namun yang paling utama adalah, strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.

Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka memasukkan konsep *ecodevelopment* dalam formulasi Kebijakan Ekonomi Baru-nya (NEP). NEP dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan kepada semua warga negara secara adil, baik ia dari komunitas Cina, India, dan masyarakat pribumi Malaysia (Faaland, Parkinson, & Saniman, 1990 dalam Kuncoro, 2004).

F. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-

negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau QOLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

Berikut ini disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut:

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa

kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga.

Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi

industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index (PQLI)* digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada; (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para

anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen

yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkul dalam peningkatan *knowledge*, *attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Bagian 3

Metodologi

Serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi yang valid dan akurat dengan dukungan referensi yang relevan serta menggunakan metode analisis deskriptif guna memperoleh hasil kajian yang jelas dan sistematis.

A. Lokasi Kajian

Kajian ini mengambil daerah wilayah Kabupaten Jayapura pada tahun 2013-2018. Kajian ini merupakan studi mengenai Indikator Pembangunan Ekonomi di Wilayah Kabupaten Jayapura tahun 2013-2018.

B. Pendekatan Kajian

Pendekatan kajian yang digunakan adalah studi deskriptif kuantitatif; meliputi data sekunder yang di peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) jurnal-jurnal dan dari hasil penelitian terdahulu.

C. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah pernyataan tentang definisi, batasan, pengertian dan pengambilan variable dalam penelitian. Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti. Variabel dalam penelitian ini meliputi:

1. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam % per tahun.

2. Pertumbuhan sektor ekonomi

Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa setiap sektor ekonomi yang dihitung dari angka PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 dan dinyatakan dalam %

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dalam penelitian ini dilihat menurut pendekatan produksi yaitu merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada

suatu jangka waktu tertentu (setahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 (tujuh belas) sektor. Dalam penyajian ini PDRB dihitung berdasarkan harga tetap (harga konstan), yaitu harga yang berlaku pada tahun dasar yang dipilih yaitu tahun 2010. Perhitungan berdasarkan harga konstan dilakukan karena sudah dibersihkan dari unsur inflasi.

4. Sektor -sektor Ekonomi

Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi.

5. Sektor Basis dan Non Basis

Sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Sektor non basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor -sektor ini tidak mengekspor barang.

6. Sektor Potensial

Sektor potensial adalah sektor yang pertumbuhannya lebih lambat namun sektor tersebut apabila di kembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

7. Jumlah penduduk

Data jumlah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura 2013-2018 yaitu meliputi seluruh kecamatan atau distrik yang ada pada kabupaten Jayapura

8. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang akan mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah.

9. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu proses dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights.

10. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data panel dimana data panel ini gabungan dari data time series. Data time series dalam penelitian menggunakan kurun waktu selama 5 tahun yaitu pada tahun 2013- 2018.

Dalam kajian ini akan menggunakan sumber data yang dipublikasikan oleh instansi-instansi terkait yang diperlukan selama proses penelitian. Sumber data penelitian ini adalah BPS (Badan Pusat Statistik)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Library Research

Merupakan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat yang digunakan untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan perpajakan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian sehingga dapat melakukan dugaan dugaan atau hipotesa.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik atau proses untuk memperoleh data dengan jalan mengumpulkan dan mencatat data-data yang telah di publikasikan.

3. Data Sekunder

Penelitian keputusan dilakukan mengumpulkan data melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Tipologi klasen, LQ, Analisis shift share, Indeks Williamson dan Regresi Data Panel. Dimana Tipologi Klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan analisis LQ digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor yang berpotensi yaitu sektor basis dan non basis. Analisis shift share digunakan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi daerah (kab/kota) dan membandingkan dengan regional (provinsi). Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah di wilayah Kabupaten Jayapura.

1. LQ (*Location Quotient*)

Metode Location Quotient (Robinson Tarigan,2005) digunakan untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relative antara kemampuan sektor di daerah (kabupaten/kota) dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas Rumus Location Quotient (LQ) adalah (Robinson Tarigan, 2005)

$$LQ = \frac{Si}{Ni} \cdot \frac{N}{S}$$

Dimana :

S_i = nilai tambah sektor i daerah studi k (kab/kota)

S = PDRB total semua sektor di daerah studi k

N_i = nilai tambah sektor i daerah referensi p (wilayah)

N = PDRB total semua sektor daerah referensi p (provinsi)

Dari perhitungan Location Quotient (LQ) suatu sektor, kriteria umum yang dihasilkan adalah:

- a. Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisnya lebih tinggi dari wilayah acuan.
- b. Jika $LQ < 1$, di sebut sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisnya lebih rendah dari wilayah acuan.
- c. Jika $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.

2. Analisis Shift Share

Analisis Shift share merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi wilayah yang juga bertujuan untuk mengetahui factor penentu pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. (Sjafrijal 2012) Mengikuti Blair (1991), formulasi analisis Shift share ini dengan menggunakan perhitungan matematika sederhana dapat di jelaskan sebagai berikut:

$$\Delta y_i = [y_i (Y_t / Y_0 - 1)] + [y_i (Y_{i t} / Y_{i 0}) - (Y_t / Y_0)] + [y_i (y_{i t} / y_{i 0}) - (Y_{i t} / Y_{i 0})]$$

Di mana

- Δy_i = peningkatan nilai tambah sektor i:
- $y_{i 0}$ = nilai tambahan sektor i di tingkat daerah pada tahun awal periode
- $y_{i t}$ = nilai tambahan sektor i di tingkat daerah pada akhir periode
- $Y_{i 0}$ = nilai tambahan sektor i di tingkat nasional pada awal periode
- $Y_{i t}$ = nilai tambahan sektor i di tingkat nasional pada akhir periode

Persamaan diatas menunjukkan bahwa peningkatan produksi atau nilai tambah suatu sektor di tingkat daerah dapat diuraikan atas tiga bagian. Bagian pertama pada sisi kiri persamaan tersebut adalah:

- a. *Regional Share*: $[y_i (Y_t / Y_0 - 1)]$ adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah.
- b. *Proportionality shift (mix shift)*: $[y_i (Y_{i t} / Y_{i 0}) - (Y_t / Y_0)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang

baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.

- c. *Differential shift (competitive shift)*: $[y_i (y_i t / y_i 0) - (Y_i t / Y_i 0)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah bersangkutan.

3. Model Analisis Shift Share Klasik

Secara ringkas, dengan analisis shift-share dapat dijelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif.

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

D_{ij} = perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j dalam kurun waktu tertentu

N_{ij} = komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j

M_{ij} = bauran industri sektor i di wilayah j

C_{ij} = keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j

Bila tiap komponen shift-share dijumlahkan untuk semua sektor maka tanda hasil penjumlahan itu akan menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan kerja nasional. Pengaruh bauran industri total akan positif/negatif/nol di semua wilayah bila kesempatan kerja suatu sektor tumbuh di atas/di bawah/sama dengan kesempatan kerja nasional. Pengaruh keunggulan kompetitif total akan positif/negatif/nol di wilayah-wilayah, dimana kesempatan kerja berkembang lebih cepat/lebih lambat atau sama dengan pertumbuhan kesempatan kerja sektor yang bersangkutan di tingkat nasional.

G. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Kajian Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jayapura ini dilaksanakan dari bulan September-Desember Tahun 2019. Rencana jadwal kerja memperlihatkan rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk urutan waktu (terjadual). Rencana jadual merujuk pada rencana kerja atau kegiatan yang disusun dan ditata sesuai periode waktu kegiatan yang tersedia.

Tabel 3.1. Jadwal Tahapan Pelaksanaan

| No | Uraian Kegiatan | Bulan | | | |
|----|--|-------|----|----|----|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Persiapan Kontrak | ■ | | | |
| 2. | Kontrak Kerjasama | ■ | | | |
| 3. | Seminar Awal | | ■ | | |
| 4. | Pelaporan Pendahuluan | | ■ | | |
| 5. | Pengumpulan Data dan Pembuatan Laporan | | ■ | ■ | |
| 6. | Penyusunan Laporan Akhir | | | ■ | |
| 7. | Seminar Akhir | | | | ■ |
| 8. | Penyelesaian Laporan Akhir dan Kontrak | | | | ■ |

Bagian 4

Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Jayapura

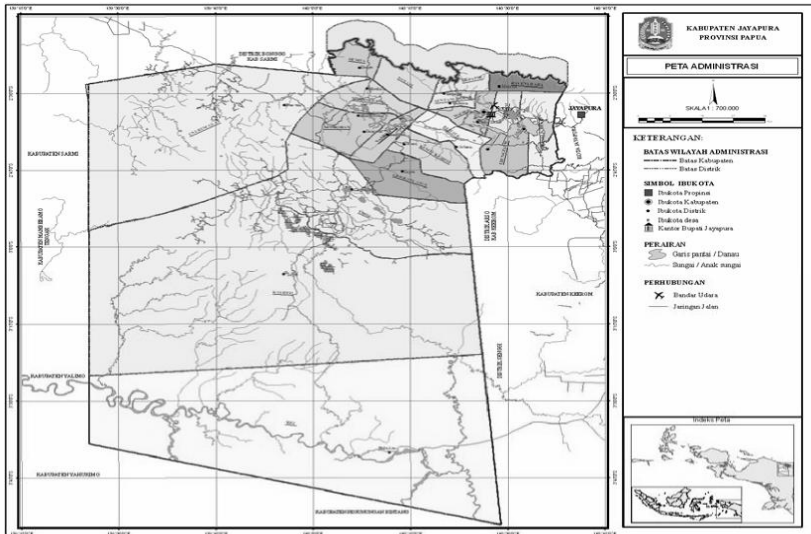
A. Kondisi Geografis

Kabupaten Jayapura terletak di antara $129^{\circ}00'16''$ - $141^{\circ}01'47''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}23'10''$ Lintang Utara dan $9^{\circ}15'00''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi;
2. Sebelah Selatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara;
3. Sebelah Timur dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom;
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Sarmi.

Gambaran mengenai wilayah administrasi Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Wilayah Administratif Kabupaten Jayapura



Luas wilayah Kabupaten Jayapura saat ini adalah 17.516.60 km² yang terbagi ke dalam 19 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan. Adapun luas masing-masing wilayah Distrik yang ada di daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Masing-Masing Distrik di Kabupaten Jayapura

| No | Distrik | Luas Wilayah (Km²) | %tase (%) |
|-----------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Kaureh | 4.357,9 | 24,88 |
| 2 | Kemtuk | 258,3 | 1,47 |
| 3 | Kemtuk Gresi | 182,4 | 1,04 |
| 4 | Nimboran | 710,2 | 4,05 |
| 5 | Nimbokrang | 774,8 | 4,42 |
| 6 | Unurum Guay | 3.131,3 | 17,88 |
| 7 | Demta | 497,5 | 2,84 |
| 8 | Depapre | 404,3 | 2,31 |
| 9 | Sentani Barat | 129,2 | 0,74 |
| 10 | Sentani | 225,9 | 1,29 |
| 11 | Sentani Timur | 484,3 | 2,76 |
| 12 | Waibu | 258,3 | 1,47 |
| 13 | Ebuungfauw | 387,4 | 2,21 |
| 14 | Namblong | 193,7 | 1,11 |
| 15 | Yapsi | 1.291,3 | 7,37 |
| 16 | Airu | 3.099,0 | 17,69 |
| 17 | Yokari | 519,5 | 2,97 |
| 18 | Ravenirara | 467,4 | 2,67 |
| 19 | Gresi Selatan | 143,9 | 0,82 |
| | Jumlah | 17.516,6 | 100,00 |

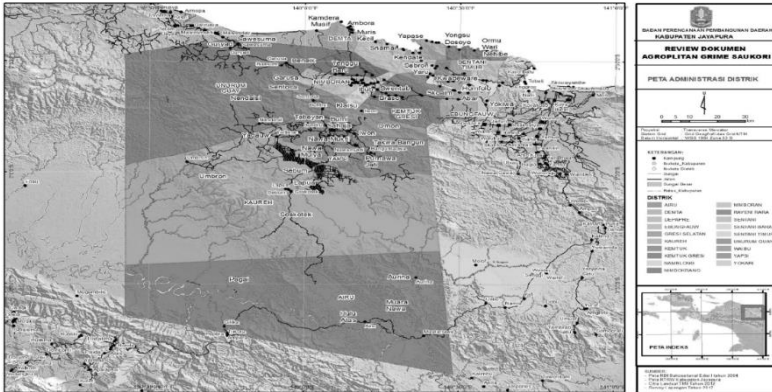
Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2019

Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa distrik di Kabupaten Jayapura yang paling luas wilayahnya saat ini adalah Distrik Kaureh dengan luas wilayah mencapai 4.357,9 km² atau 24,88% dari total luas wilayah Kabupaten Jayapura. Kemudian disusul oleh Distrik Unurum Guay dengan luas wilayah mencapai 3.131,3 km² atau 17,88% dan Distrik Airu dengan luas wilayah sebesar 3.099 km² atau 17,69% dari total luas wilayah Kabupaten Jayapura. Sebaliknya, distrik yang paling kecil wilayahnya adalah Distrik Senatni Barat dengan luas wilayah hanya mencapai 129,2 km² atau hanya 0,74% dari total luas wilayah Kabupaten Jayapura saat ini.

Kemudian keadaan topografi Kabupaten Jayapura terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, daerah berbukit dan daerah pengunungan. Ketinggian wilayahnya berada di antara 0,5 m dpl - 1500 m dpl, tingkat kemiringan lereng berkisar antara 5-30 %. Daerah pesisir utara, pada umumnya berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0-10 % yang ditutupi dengan endapan alluvial. Pada dataran rendah tersebut terdapat daerah rawa ± 13,700 ha. Pengunungan di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain pengunungan Cycloop yang terbentang antara Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur,

Depapre dan Revenirara di sebelah utara, selain itu di sebelah selatan terdapat pegunungan Karamor di Distrik Kaureh. Sebagian besar tanah di Kabupaten Jayapura berupa batuan sedimen tersier dan pleistosen tanpa kapur, konglomerat, batu liat, debu, pasir dan berupa nopal (65, 22%). Kemudian sebagian lainnya berupa debu deposit kwarter (rawa) yang menutupi batuan sedimen, tersier, dan pleistosen (17, 28%), karang koral, batuan liat, batu kapur/gamping, granit dan sebagainya. Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura, yakni mencapai 72,09% dari total luas wilayah daerah ini berada pada kemiringan di atas 41%, sedangkan yang mempunyai kemiringan 0 - 5% berkisar 23,74% dari total luas wilayah daerah ini. Ketinggian tempat sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura di bawah 500 m dpl mencapai luas wilayah sebesar 606.400 ha atau 61, 01 %, ketinggian 500 - 1000 m dpl dan ketinggian 1000 - 2000 m dpl mencapai luas wilayah sebesar 149.900 ha atau 15. 08% dari total luas wilayah Kabupaten Jayapura saat ini.

Gambar 4.2
Peta Administrasi Distrik di Kabupaten Jayapura



Sumber air di Kabupaten Jayapura terdiri dari sungai, danau dan air tanah. Sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Jayapura sebanyak 4 buah, yakni DAS Grime, DAS Sentani, DAS Sermo dan DAS Wiru yang sebagian besar menuju ke pantai Utara (Samudera Pasifik) dan pada umumnya sangat tergantung pada fluktuasi air hujan. Disamping itu terdapat sungai-sungai kecil yang merupakan sumber air permukaan yang mengalir di wilayah ini. Danau yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura adalah Danau Sentani dengan luas mencapai 9.630 Ha dan berada di Distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfauw dan Waibu. Bagian utara berhadapan langsung dengan Samudera pasifik memiliki slop

kedalaman curam hingga 1000-1500 m pada jarak 10 km dari garis pantai. Profil kedalaman perairan ke arah barat memiliki jarak kelandaian yang lebih besar hingga 35 km dengan kedalaman 500 m, setelah itu slope kedalaman semakin curam sampai kedalaman 2.500-4.000 m. Kabupaten Jayapura memiliki 21 sungai/kali, yaitu:

Tabel 4.2
Sungai di Kabupaten Jayapura

| Distrik | Nama Sungai | Keterangan |
|----------------|--------------------|--|
| Unurum Guay | Sungai Wiru | Bercabangan dengan sungai sifo |
| | Sungai Sifo | Bercabangan dengan S. Busoof dan S. Berian |
| | Sungai Berian | Menuju daerah Bongo |
| | Sungai Busoof | Sebelah selatan Beneik |
| | Sungai Dju | Sebelah utara sentosa |
| | Sungai Nano | Sebelah barat s. nano, sebelah selatan Guryad menuju daerah Bonggo |
| | Sungai Pewo | Daerah Bonggo |
| | Sungai Nawa | Melewati daerah Kaureh dan U.Guay (sebelah selatan santosa). |
| Kaureh | Sungai Wanda | Berasal dari daerah senggi |

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| Distrik | Nama Sungai | Keterangan |
|-----------------------------|--------------------|---|
| | Sungai Idenburg | Bersambungan dengan sungai Memberamo (daerah hulu atas) dan bercabangan dengan sungai waruta di Aurina |
| | Sungai Waruta | Melewati unurum Guay da daerah Keerom |
| | Sungai Samir | Merupakan anak sungai damar (Oyengsi) |
| | Sungai Damar | Yenggu menuju ke utara. Melewati Benyom jaya II menuju daerah dempta. Melewati Kuipons, Benyom Jaya I menuj dempta. |
| Nimboran/ Nimbokrang | Sungai Moaif | (Yakore), dan bercabangan dengan S. Grime disebelah Timur. |
| | Sungai Nanggulu | Meleewati U.Guay, Kentuk, S. Pale smpai daerah Sekori, Hamonggrang, Betaf dan bercabangan dengan S. Naggulu. |
| | Sungai Grimi | Daerah Sermai |
| Kemtuk / Kemtuk Gresi | Sungai Pale | Daerah sama, mamda, soaib, dan sabeyab, dan bercabangan dengan S. Grime. |

| Distrik | Nama Sungai | Keterangan |
|----------------|--------------------|---|
| | Sungai Tenak | Melewati Sekori menuju Donday (Danau Sentani) |
| Sentani Timur | Sungai Kujanu | Sebelah utara Danau Sentani. |
| Demta | Sungai Humbei | Daerh Muaif, bersebelahan dengan aliran s.Grime dan bermuara di lautan pasifik (dekat tanjung Kamdera). |
| | Sungai Sermo | Sebelah barat Muaif (daerah Bonggo). |

Dikabupaten Jayapura terdapat 1 (satu) Danau yaitu danau Sentani lusnya \pm 9.630 Ha terdapat di 5 (lima) Distrik yaitu Distrik Sentani Timur, Distrik Sentani Barat, Distrik Sentani, Distrik Waibu, dan Distrik Ebungfauw.

Wilayah Kabupaten Jayapura pada umumnya beriklim tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 23, 6°C–33,4°C. Khusus daerah pantai rata-rata 26 °C, sedangkan di daerah pedalaman suhunya bervariasi sesuai ketinggian dari permukaan laut. Suhu udara pada bulan Juli dan Agustus terendah rata-rata 23,6°C dan pada bulan Oktober tertinggi dengan rata-rata 33,4°C.

Tabel 4.3
Data Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten
Jayapura

| Bulan | Curah Hujan (mm) | | Hari Hujan | |
|-----------|------------------|--------|------------|--------|
| | Senta | Genyem | Sentani | Genyem |
| Januari | 222,9 | 426,8 | 20 | 26 |
| Februari | 137,5 | 305,0 | 16 | 21 |
| Maret | 115,5 | 212,1 | 21 | 22 |
| April | 76,8 | 185,3 | 18 | 20 |
| Mei | 86,0 | - | 19 | - |
| Juni | 84,0 | 156,8 | 12 | 14 |
| Juli | 133,8 | 118,7 | 16 | 15 |
| Agustus | 45,2 | 75,5 | 10 | 8 |
| September | 177,0 | 179,5 | 8 | 14 |
| Oktober | 53,2 | 86,1 | 9 | 12 |
| November | 113,6 | 272,5 | 15 | 14 |
| Desember | 88,7 | 354,4 | 19 | 25 |
| Rataan | 111,2 | 215,7 | 15,3 | 17,4 |

Sumber: BMKG Sentani dan Genyem, BPS Kab.Jayapura (2019)

Pada bulan Mei-November angin bertiup dari Tenggara yang kurang mengandung uap air, bulan Desember-April bertiup angin musim Barat Laut yang mendatangkan hujan dengan intensitas ± 6000 mm/tahun. Jumlah hari hujan dalam setahun sekitar 159 hari dan rata-rata kecepatan angin 2,0 - 2,5 knot. Curah hujan berkisar antara 150 - 229 mm/hari, curah hujan tertinggi terjadi di pesisir pantai

Utara sedangkan curah hujan terendah di daerah pedalaman, yakni di sekitar wilayah Kemtuk Gresi – Nimboran. Pada bulan Maret curah hujan terendah adalah 59 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 238 mm/hari.

Curah hujan tahunan di wilayah kabupaten Jayapura diambil dari stasiun sentani dan genyem. Data curah hujan dan hari hujan pada stasiun genyem lebih besar. Curah hujan yang tercatat di sentani berkisar 76,8 mm hingga 222,9 mm dengan jumlah hujan per tahun 1.334,2 mm. Pada stasiun genyem berkisar 75,5 hingga 426,8 mm dengan jumlah curah hujan pertahun 2588,4 mm. Jumlah bulan basah di daerah ini adalah sebanyak 6 bulan dan tanpa bulan kering. Berdasarkan zona agroklimat (Oldeman at al.1980) daerah ini termasuk zone A, B1, dan C1.klasifikasi iklim menurut Oldeman, yang didasarkan pada banyaknya bulan basah (>200 mm) berturut-turut dan bulan kering (<100 mm), maka kawasan pengembangan Agropolitan yang diwakili oleh stasiun Genyem, yaitu dengan 6 bulan basah dan tanpa bulan kering, termasuk dalam zone agroklimat C1 (6-8 bulan basah dan < 2 bulan kering).

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim menurut Koppen, yang didasarkan pada bulan kering (< 60 mm) dan bulan basah (>100 mm), maka kawasan pengembangan agropolitan

tersebut termasuk dalam tipe iklim Af atau tipe iklim hujan tropis. Rata-rata penyebaran curah hujan per bulannya dapat dikatakan hamper merata sepanjang tahun, karena tidak terdapat bulan kering.

Rataan suhu bulanan minimum berkisar 22, 1-4, 3 °C. Kelembaban udara berkisar 84, 8% - 87, 0%. Berdasarkan laporan sebelumnya, suhu udara rata-rata di kawasan pengembangan agropolitan adalah 27,6 °C. Rata-rata suhu udara tertinggi 27,8C jatuh pada bulan Oktober - Desember dan April - Mei dan suhu terendah 27, 0 °C jatuh pada bulan Juli. Rata-rata suhu udara maksimum 32, 2 °C dan rata-rata suhu minimum adalah 23C dengan rata-rata kelembaban udara 81 %.

Tabel 4.4
Data Suhu dan Kelembaban Udara di Wilayah
Kabupaten Jayapura

| Bulan | Suhu Udara Minimum (°C) | | Kelembaban Udara (%) |
|----------|----------------------------|--------|-------------------------|
| | Sentani | Genyem | Sentani |
| Januari | 24,1 | 23,6 | 87,0 |
| Februari | 24,2 | 23,6 | 86,0 |
| Maret | 24,3 | 23,3 | 86,2 |
| April | 24,3 | 23,3 | 86,2 |
| Mei | 24,2 | - | 86,0 |
| Juni | 24,1 | 23,6 | 86,4 |
| Juli | 23,5 | 23,2 | 85,2 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| Agustus | 23,9 | 22,4 | 86,0 |
| September | 23,9 | 22,5 | 86,0 |
| Oktober | 24,0 | 21,7 | 84,8 |
| November | 24,2 | 21,2 | 87,0 |
| Desember | 22,1 | 21,7 | 86,5 |
| Rataan | 23,9 | 22,7 | 86,1 |

Sumber: BMKG Sentani dan Genyem, BP Kab.Jayapura (2019)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa karakteristik yang dimiliki Kabupaten Jayapura merupakan tantangan yang besar dalam pengembangan daerah ini di masa datang untuk mampu menjadi kabupaten yang sejajar, bahkan mampu melebihi kemajuan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kondisi geografis dengan tingkat keragaman yang dimiliki harus tetap mendapat perhatian khusus dan menuntut kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan kegiatan pembangunan dan masalah kemasyarakatan lainnya serta pengawasan dan implementasinya.

B. Kondisi Demografis (Kependudukan)

Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan di setiap daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduknya yang dalam proses pembangunan berperan sebagai subjek (pelaksana pembangunan) dan sekaligus sebagai objek (penikmat pembangunan).

Oleh karena itu, masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat vital dan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik. Namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah karena akan menimbulkan terjadinya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Tabe, berikut menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura senantiasa mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2013-2018, yakni pada tahun 2018 berjumlah 128.587 yang terdiri dari penduduk laki-laki 67.383 jiwa dan penduduk perempuan 61.204 jiwa.

Tabel 4.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura
Tahun 2014 - 2018

| Tahun | Penduduk (Jiwa) | | | Perkembangan (%) |
|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Total | |
| 2013 | | | 118,789 | |
| 2014 | 62.796 | 56.587 | 119,383 | 0.50 |
| 2015 | 63,891 | 57,591 | 121,410 | 1.70 |
| 2016 | 63,891 | 57,519 | 123,780 | 1.95 |
| 2017 | 66,307 | 59,668 | 125,975 | 1.77 |
| 2018 | 67,383 | 61,204 | 128,587 | 2.07 |
| Rata-rata | | | | 1.87 |

Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

Selanjutnya, dapat dilihat tingkat sebaran penduduk di Kabupaten Jayapura yang saat ini pada umumnya masih terkonsentrasi pada daerah-daerah pusat pemerintahan dan perekonomian atau perdagangan, terutama di Distrik Sentani sebagai Ibukota Kabupaten. Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura, Dirinci Menurut Distrik

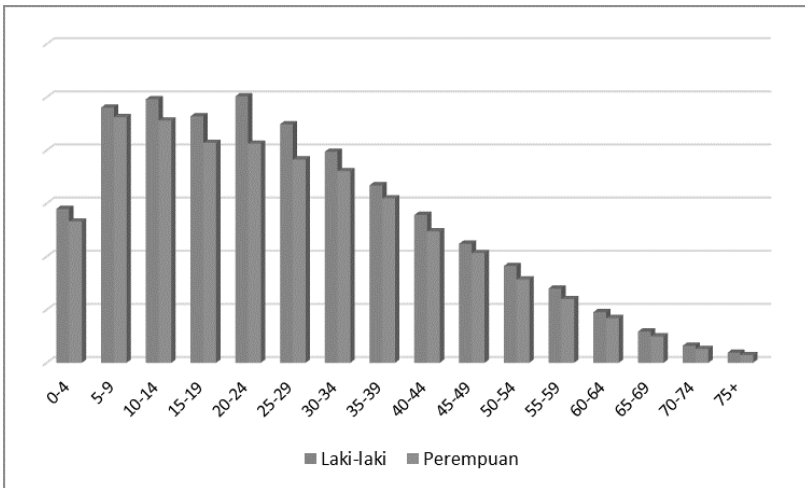
| NO. | Distrik | Luas wilayah | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (%) |
|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. | KAUREH | 4,357.9 | 7,067 | 1.62 |
| 2. | AIRU | 3,099.0 | 1,068 | 0.34 |
| 3. | YAPSI | 1,291.3 | 6,485 | 5.02 |
| 4. | KEMTUK | 258.3 | 4,111 | 15.92 |
| 5. | KEMTUK GRESI | 182.4 | 4,723 | 25.89 |
| 6. | GRESI SELATAN | 143.9 | 1,040 | 7.23 |
| 7. | NIMBORAN | 710.2 | 4,601 | 6.48 |
| 8. | NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG | 193.7 | 3,397 | 17.54 |
| 9. | NIMBOKRANG | 774.8 | 7,182 | 9.27 |
| 10. | UNURUM GUAY | 3,131.3 | 2,228 | 0.71 |
| 11. | DEMTA | 497.50 | 3,625 | 7.29 |
| 12. | YOKARI | 519.50 | 2,191 | 4.22 |
| 13. | DEPAPRE | 404.30 | 4,390 | 10.86 |
| 14. | RAVENIRARA | 467.40 | 1,301 | 2.78 |
| 15. | SENTANI BARAT | 129.20 | 4,732 | 36.63 |
| 16. | WAIBU | 258.30 | 8,132 | 31.48 |
| 17. | SENTANI | 225.90 | 51,155 | 226.45 |
| 18. | EBUNGFAU | 387.40 | 2,862 | 7.39 |
| 19. | SENTANI TIMUR | 484.30 | 8,297 | 17.13 |
| JAYAPURA | | 17,516.6 | 128,587 | 7.34 |

Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

Pada Tabel 4. 6 di atas terlihat bahwa Distrik Sentani sebagai Ibukota Kabupaten Jayapuran yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 51.155 jiwa, sedangkan Distrik Gresi Selatan memiliki jumlah penduduk terkecil, yakni hanya sebanyak 1.040 jiwa atau hanya

sebesar 7,23 % dari total penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2018.

Gambar 4.3
Distribusi Penduduk Kabupaten Jayapura
Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: Proyeksi Penduduk menurut Pusdatin, 2019

Kemudian dengan luas wilayah sebesar 17.516,6 kilometer persegi yang didiami oleh 128.587 jiwa, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2018 adalah sebesar 7,4 jiwa per kilometer persegi. Distrik Sentani yang merupakan Ibu Kota Kabupaten merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 226.45 jiwa per kilometer persegi.

Sebaliknya, Distrik Airu merupakan distrik yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya, yakni hanya 0,34 jiwa perkilometer persegi. Hal ini disebabkan karena Distrik Sentani sebagai ibukota Kabupaten secara otomatis memiliki fasilitas yang relatif lebih lengkap, sehingga telah menjadi magnet penarik bagi pendatang atau para migran untuk memasuki wilayah ini.

Keadaan Sex Ratio di Kabupaten Jayapura pada tahun 2015 adalah sebesar 111 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 11% dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan atau dengan kata lain terdapat 111 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan. Distrik Kaureh merupakan distrik dengan Sex Ratio tertinggi, yaitu 147 sedangkan sex ratio terkecil dengan nilai 100 terdapat di 3 (tiga) distrik, yaitu Kemtuk Gresi, Gresi Selatan dan Sentani Timur.

Salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan penduduk adalah dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia memerlukan solusi yang berbeda-beda sesuai dengan keberagaman usia penduduk yang menempati daerah tersebut. Setiap kelompok umur penduduk mempunyai permasalahan yang berbeda dengan kelompok umur penduduk lainnya. Penduduk pada usia

balita (0-4 tahun) memerlukan perhatian dan penanganan lebih pada masalah kesehatan. Kemudian penduduk yang berada pada kisaran usia sekolah (usia 5-18 tahun) memerlukan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Selanjutnya, penduduk pada usia kerja (usia 15 tahun ke atas) perlu penyediaan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran.

Pada tahun 2018, sebanyak 141 .004 jiwa atau 71.65 % dari total penduduk Kabupaten Jayapura merupakan kelompok usia produktif, yakni berada pada usia 15-64 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 55.784 jiwa atau 28,35 % dari total penduduk merupakan kelompok usia tidak produktif, yakni berada pada usia 0 - 14 dan 65 tahun ke atas. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa angka ketergantungan (*age dependency ratio*) masih cukup tinggi, yaitu 39, 56%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 penduduk usia tidak produktif. Semakin tinggi angka beban ketergantungan, maka pelaksanaan pembangunan akan semakin terhambat. Oleh karena itu, angka beban ketergantungan yang masih relatif tinggi di Kabupaten Jayapura saat ini harus diikuti dengan upaya pemerintah daerah ini untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi usia produktif. Salah satu wujudnya adalah mendorong pengembangan

aktivitas usaha pada sektor-sektor ekonomi penghasil komoditi unggulan daerah ini yang tersebar pada berbagai sub sektor pertanian, serta sektorsektor ekonomi yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor unggulan tersebut, utamanya sektor industri untuk mendorong pengolahan komoditi-komoditi unggulan daerah ini terlebih dahulu sebelum dijual ke pasar, sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani, peternak, dan nelayan yang menjadi produsennya.

Pertambahan penduduk daerah ini lebih banyak disebabkan oleh proses masuk (in-migration) penduduk dari daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk dari dalam Provinsi Papua, yang masuk sebagai imigran spontan ke Kabupaten Jayapura. Pertambahan penduduk secara alamiah kurang berpengaruh karena tingkat kematian dan tingkat kelahiran di daerah ini masih sama-sama tinggi oleh karena kondisi kesakitan (morbidity) masyarakat relatif masih tinggi.

Jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sesuai tingkat pendidikan/lulusan pada tahun 2013-2016 pada berbagai tingkat pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selengkapnya seperti tabel berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

| NO | Jumlah Penduduk | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | SD | 21,513 | 25,430 | 26,845 | 30,180 |
| 2 | SMP | 21,581 | 27,016 | 28,972 | 32,590 |
| 3 | SMA | 51,084 | 66,934 | 73,395 | 86,227 |
| 4 | D1-DIII | 3,974 | 4,667 | 5,256 | 5,722 |
| 5 | S1 | 6,355 | 7,975 | 9,025 | 10,495 |
| 6 | S2 | 455 | 589 | 661 | 752 |
| 7 | S3 | 55 | 67 | 71 | 91 |
| | jumlah | 105,017 | 132,678 | 144,225 | 166,057 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, 2019

Nilai rata-rata dan kelulusan merupakan indikator keberhasilan institusi pendidikan dalam melaksanakan program-programnya yaitu peningkatan sumber daya manusia. Nilai rata - rata UAS/UAN merupakan refleksi berhasil atau tidaknya murid sekolah (individu murid) sedangkan tingkat kelulusan merupakan indikator keberhasilan institusi pendidikan dalam melaksanakan programnya guna menunjang mutu sekolah yang pada akhirnya akan diperoleh mutu SDM Masyarakat Kabupaten Jayapura.

Bila dibandingkan dengan APS Provinsi Papua, daya serap pendidikan untuk anak usia sekolah pada tiap jenjang di Kabupaten Jayapura lebih besar dari Provinsi Papua secara keseluruhan.

Seperti halnya sektor pendidikan maka pembangunan sektor kesehatan juga merupakan aspek terpenting dalam pembangunan manusia yang berkualitas yang dimulai sejak janin dalam kandungan. Pembangunan kesehatan yang telah dilakukan selama ini di Kabupaten Jayapura telah menunjukkan perubahan peningkatan baik dari segi akses pelayanan kesehatan maupun dari segi kualitas pelayanan. Namun demikian upaya yang dilakukan secara keseluruhan belum dapat mencapai status derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura sesuai standar nasional, dimana angka umur harapan hidup baru mencapai 66,4 tahun angka kematian bayi 23/1000 KLH dan angka kematian ibu berkisar 184/100.000 KLH.

Angka kesakitan malaria pada tahun 2017 mengalami penurunan kasus bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 25.072 kasus menjadi 22.140 kasus atau turun sekitar (11, 7%) tahun 2017 dan menempati posisi kedua setelah Penyakit ISPA dengan jumlah kasus 62.533 kasus (42, 05%) serta diikuti kasus-kasus lain seperti; Penyakit pada sistim otot dan jaringan pengikat 15.987 kasus (10, 75%), Penyakit Kulit Infeksi 11. 440 kasus (7, 69%) Gastritis 9.797 kasus (6, 59% Tekanan Darah Tinggi 4.867 (3, 27%), Infeksis Penyakit Usus 4.766 kasus (3, 20%),

Diare 4,402 kasus (2, 96%), Kecelakaan dan Ruda paksa berjumlah 3. 302 kasus (2, 22%) Penyakit Kulit Karena Jamur 3.204 Kasus (2, 15%) serta Penyakit lainnya 6278 kasus (4, 22%). Disisi lain pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan tetap terus dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan. Kabupaten Jayapura memiliki 1 Rumah sakit Umum Daerah dan dari 19 Distrik semua sudah tersedia sarana Puskesmas, 6 diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas perawatan dan 13 Puskesmas rawat jalan , 65 Puskesmas Pembantu (Pustu), 19 Polindes (Pondok bersalin desa), 22 unit Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4 dan 3 unit pusling air serta disetiap puskesmas di sediakan juga pusling roda 2.

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

Sebaran Penduduk Asli Papua dan Non Asli Papua Tahun 2017

| NO. | Distrik | Hasil Sementara Penduduk OAP dan Non Papua Tahun 2017 (jwa) | | | | | Persentase | |
|-----------------|----------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Total | Papua | Non Papua | Papua | Non Papua |
| 1. | Kaureh | 3,971 | 2,954 | 6,925 | 5,055 | 1,870 | 73.00 | 27.00 |
| 2. | Airu | 574 | 467 | 1,041 | 1,027 | 14 | 98.66 | 1.34 |
| 3. | Yapsi | 3,409 | 2,954 | 6,363 | 954 | 5,409 | 14.99 | 85.01 |
| 4. | Kentuk | 2,000 | 2,018 | 4,018 | 3,930 | 88 | 97.81 | 2.19 |
| 5. | Kentuk Gresi | 2,296 | 2,317 | 4,613 | 4,475 | 138 | 97.01 | 2.99 |
| 6. | Gresi Selatan | 502 | 513 | 1,015 | 995 | 20 | 98.03 | 1.97 |
| 7. | Nimboran | 2,340 | 2,167 | 4,507 | 4,095 | 412 | 90.86 | 9.14 |
| 8. | Nimboran Timur | 1,715 | 1,613 | 3,328 | 2,401 | 927 | 72.15 | 27.85 |
| 9. | Nimbokrang | 3,684 | 3,364 | 7,048 | 352 | 6,696 | 4.99 | 95.01 |
| 10. | Unurum Guay | 1,172 | 1,009 | 2,181 | 1,860 | 321 | 85.28 | 14.72 |
| 11. | Demta | 1,872 | 1,675 | 3,547 | 3,189 | 358 | 89.91 | 10.09 |
| 12. | Yokari | 1,154 | 987 | 2,141 | 3,139 | 2 | 146.61 | 0.09 |
| 13. | Depapre | 2,217 | 2,077 | 4,294 | 3,987 | 307 | 92.85 | 7.15 |
| 14. | Ravenirara | 641 | 628 | 1,269 | 1,257 | 12 | 99.05 | 0.95 |
| 15. | Sentani Barat | 2,408 | 2,232 | 4,640 | 2,784 | 1,856 | 60.00 | 40.00 |
| 16. | Waibu | 4,126 | 3,822 | 7,948 | 6,923 | 1,025 | 87.10 | 12.90 |
| 17. | Sentani | 26,735 | 23,427 | 50,162 | 25,247 | 24,915 | 50.33 | 49.67 |
| 18. | Ebungfau | 1,419 | 1,377 | 2,796 | 2,656 | 140 | 94.99 | 5.01 |
| 19. | Sentani Timur | 4,072 | 4,067 | 8,139 | 3,663 | 4,476 | 45.01 | 54.99 |
| JAYAPURA | | 66,307 | 59,668 | 125,975 | 77,989 | 48,986 | 61.91 | 38.89 |

C. Kondisi Ketenagakerjaan

Data Ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berbasis investasi mengakibatkan tidak adanya penyerapan tenaga kerja baru. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada keadaan penduduk daerah ini yang dikelompokkan menurut jenis pekerjaan mereka, sebagaimana yang nampak pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.8
Penduduk Kabupaten Jayapura Dirinci Menurut
Jenis Pekerjaan

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Jiwa) | %tase (%) |
|----|---------------------|---------------|-----------|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 55.265 | 28,08 |
| 2 | IRT | 24.000 | 12,20 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 45.594 | 23,17 |
| 4 | Pensiunan | 1.124 | 0,57 |
| 5 | PNS | 7.437 | 3,78 |
| 6 | TNI/POLRI | 3.937 | 2,00 |
| 7 | Pedagang | 1.584 | 0,80 |
| 8 | Petani | 17.092 | 8,69 |
| 9 | Peternak | 72 | 0,04 |
| 10 | Nelayan | 739 | 0,38 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | | |
|----|--------------------------|----------------|---------------|
| 11 | Buruh | 1.679 | 0,85 |
| 12 | Swasta | 33.732 | 17,14 |
| 13 | Jasa | 3.011 | 1,53 |
| 14 | Guru/Dosen | 1.114 | 0,57 |
| 15 | Dokter/Bidan /Perawat | 408 | 0,21 |
| | TOTAL | 196.788 | 100,00 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Jayapura, Tahun 2019

Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa Penduduk Kabupaten Jayapura yang masuk kategori belum/tidak bekerja pada tahun 2013 mencapai 55.265 jiwa atau 28,08% dari total penduduk daerah ini. Selain itu, terlihat pula bahwa sebanyak 45.594 jiwa atau 23,17% dari total penduduk daerah ini yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Demikian pula kelompok penduduk yang masuk kategori sebagai Ibu Rumahtangga (IRT) mencapai 24.000 jiwa atau 12,02% dari total penduduk serta kelompok pensiunan yang mencapai 1.124 jiwa atau 0,57% dari total penduduk. Berdasarkan data ini, maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang masuk kelompok penduduk tidak produktif pada tahun 2013 dilihat dari aspek pengelompokan ini adalah mencapai 125.983 jiwa atau 64,02% dari total penduduk, sehingga dengan sendirinya akan memperbesar beban bagi

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

kelompok penduduk produktif daerah ini yang bekerja pada berbagai profesi, yakni petani, peternak, nelayan, pedagang, swasta, jasa, guru/dosen, dokter/bidan/perawat, buruh, TNI/POLRI, dan PNS yang totalnya mencapai 70.805 jiwa atau 35,98% dari total penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2013.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang produktif dengan bekerja pada berbagai bidang profesi lebih kecil dibandingkan dengan kelompok penduduk daerah ini yang tidak produktif, sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang lebih besar, yakni setiap 1 (satu) orang penduduk produktif daerah ini harus menanggung lebih dari 1 (satu) orang penduduk yang tidak produktif, sehingga beban tersebut cukup berat untuk dipikul oleh para tenaga kerja produktif tersebut. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Jayapura di masa datang untuk menyediakan lapangan pekerjaan, utamanya lapangan pekerjaan yang memiliki multiplier effect yang besar, seperti lapangan pekerjaan di pertanian sebagai sektor utama (*leading sector*) serta sektor industri (utamanya agroindustri), perdagangan, transportasi dan jasa keuangan sebagai sektor penunjang utama. Pada sisi inilah terlihat pentingnya untuk segera mendorong pengembangan

sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan komoditi-komoditi unggulan daerah ini, yakni dengan menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai untuk mengelola aktivitas di sektor-sektor penghasil komoditi unggulan tersebut serta menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan dan mendorong peningkatan investasi pada sektor ini melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan sumberdaya modal yang mudah diakses oleh para pelaku usaha, utamanya para pengelola usaha mikro, kecil dan menengah serta pengelola industri rumahtangga dan industri kecil.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2013, %tase terbesar penduduk usia kerja di Kabupaten Jayapura adalah penduduk bekerja, yakni mencapai 57.56%. Dilihat dari sisi produktivitas tenaga kerja, maka hal ini cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja yang bekerja, maka tentu akan menghasilkan pula jumlah produksi yang besar. Namun demikian, tingkat produktifitas harus pula dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut. Dalam artian bahwa meskipun jumlah tenaga kerja besar tetapi jika tidak diimbangi dengan Skill atau keterampilan

yang memadai maka tidak mampu menghasilkan tingkat produktifitas yang tinggi, sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya, dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yakni perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Berdasarkan data di di bawah ini, dapat dilihat bahwa dari total penduduk Kabupaten Jayapura yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2013, sebanyak 61,52% merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya yang mencapai 38,48% bukan angkatan kerja. Kemudian dapat pula dilihat bahwa sebesar 57,56% angkatan kerja di Kabupaten Jayapura yang berstatus bekerja pada tahun 2013 yang terdiri dari 39,12% adalah laki-laki dan perempuan sebesar 18,45%. Kemudian angkatan kerja yang masih berstatus sebagai pencari kerja sebesar 3,96% yang terdiri dari laki-laki sebesar 2,31% dan perempuan sebesar 1,65% dari total angkatan kerja pada tahun 2013.

Tabel 4.9
**%tase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut
Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu**

| Penduduk | Angkatan Kerja (%) | | Bukan Angkatan Kerja (%) | | | Jumlah (%) |
|--------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | Bekerja | Mencari Kerja | Sekolah | Mengurus RT | Lainnya | |
| Laki-laki | 39,12 | 2,31 | 9,07 | 1,22 | 2,06 | 53,77 |
| Perempuan | 18,45 | 1,65 | 7,25 | 18,17 | 0,71 | 46,23 |
| TOTAL | 57,56 | 3,96 | 16,33 | 19,39 | 2,76 | 100,00 |

Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2019

Selanjutnya, pada tabel 4.11 dapat pula dilihat bahwa sekitar 61,52% atau 62% dari total penduduk usia kerja di Kabupaten Jayapura merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi (penduduk yang termasuk angkatan kerja). Hal ini menunjukkan tingginya angka TPAK di daerah ini pada tahun 2013, yakni sebesar 61,52%. Kemudian sisanya, yakni sebesar 38,48% merupakan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, yaitu penduduk dengan kegiatan utama sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Kemudian dilihat dari sisi gender, maka TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibanding dengan TPAK perempuan, yakni masing-masing sebesar 67,34% dan 32,67%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara

umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan budaya/tradisi masyarakat di Kabupaten Jayapura, sebagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya, yakni menempatkan laki-laki (suami sekaligus kepala rumah tangga) pada posisi sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Dilihat dari aspek tingkat pendidikan para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Jayapura saat ini, maka dapat diketahui bahwa pada umumnya berada pada tingkat pendidikan tamat SLTA/SMK, yakni jumlahnya mencapai 35,34%. Kemudian disusul oleh penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan tamat SLTP/MTs, yakni sebesar 21,80%. Relatif masih tingginya jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan rendah, yakni tingkat SLTP ke bawah yang mencapai 51,85% pada ahun 2013 mengindikasikan masih tradisionalnya metode kerja yang digunakan para tenaga kerja yang bekerja di daerah ini, dimana untuk menghasilkan jumlah produksi (output) yang besar harus digunakan jumlah tenaga kerja yang banyak. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Jayapura saat ini, dapat dilihat datanya pada tabel berikut:

Tabel 4.10

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

**%tase Penduduk Bekerja di Kabupaten Jayapura
Menurut Jenis Kelamin Dirinci Berdasarkan Pendidikan
Tertinggi Yang Ditamatkan**

| Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Laki-laki | Perempuan | Lk+Pr |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Belum sekolah dan tidak tamat | 6,74 | 19,41 | 10,80 |
| SD | 17,00 | 24,02 | 19,25 |
| SLTP/MTs | 26,29 | 12,28 | 21,80 |
| SLTA/SMK | 41,84 | 21,55 | 35,34 |
| Diploma/Sarjana | 8,13 | 22,74 | 12,82 |
| Jumlah | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2019

Berdasarkan di atas dapat pula dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura yang bekerja dengan tingkat pendidikan minimal tamat pendidikan tinggi atau tamat SLTA ke atas mencapai 48,16%, yang terdiri dari tamatan SLTA sebanyak 35,34% dan tamatan Perguruan Tinggi (Diploma/Sarjana) sebanyak 12,82%. Keadaan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Jayapura mengingat bahwa kualitas dan kapasitas tenaga kerja di daerah ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Sehingga perlu disediakan layanan pendidikan yang memadai. Selanjutnya, keadaan tenaga kerja di Kabupaten Jayapura yang bekerja pada berbagai sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
%tase Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Jayapura
Menurut Kelompok Sektor Ekonomi

| No | Kelompok Sektor | Lk | Pr | Lk+Pr |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 1 | Primer | | | |
| | Pertanian, Pertambangan & penggalian | 14.820 | 7.814 | 22.634 |
| 2 | Sekunder | | | |
| | Industri, Listrik & air bersih, Konstruksi | 4.395 | 399 | 6.794 |
| 3 | Tersier | | | |
| | Perdagangan, hotel & restoran, Transportasi & telekomunikasi Keuangan, persewaan & jasa perusahaan Jasa-jasa | 10.741 | 6.617 | 17.358 |
| JUMLAH | | 29.956 | 14.830 | 44.786 |

Sumber: Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2019

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa dari kelompok sektor ekonomi, maka sektor primer merupakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yakni mencapai 22.634 dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Jayapura pada tahun 2015. Penyerapan tenaga kerja di kelompok sektor lain, yakni sektor sekunder dan tersier masih sedikit, masing-masing sebesar 6.794 dan 17.358. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya berpendidikan

rendah (tidak/belum sekolah, tidak/belum tamat SD, dan tamat SD).

Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengharuskan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memberi perhatian yang lebih besar pada sektor ini, sehingga sektor pertanian di daerah ini dapat berkembang dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Jayapura. Peningkatan aktivitas penyuluhan di bidang pertanian merupakan pilihan yang efektif untuk diterapkan mengingat bahwa sistem pertanian yang digunakan oleh sebagian besar petani di Kabupaten Jayapura saat ini masih sangat tradisional dan tingkat pendidikan pekerja masih sangat rendah.

Selain itu, akses pemasaran hasil pertanian perlu pula dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura karena kesejahteraan petani tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pemasaran produk pertanian yang dihasilkan.

D. Wilayah Pembangunan Daerah

1. *Potensi Pengembangan Wilayah*

Secara yuridis Kabupaten Jayapura sudah dimekarkan sesuai UU Nomor 26 Tahun 2003 menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura (induk) dengan ibukota Sentani, kabupaten Sarmi ($\pm 35.589 \text{ km}^2$) dengan ibukota Sarmi dan kabupaten Keerom ($\pm 8.390 \text{ km}^2$) dengan ibukota Arso. Setelah pemekaran Kabupaten Jayapura terletak pada $139025'32,4''$ - $140038'38,53''$ BT dan $3045'7.28''$ LU - $2019'21.82''$ LS.

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu Kabupaten Induk yang telah berhasil memekarkan beberapa wilayahnya menjadi Kotamadya maupun beberapa Kabupaten pemekaran. Pada tahun 1983, Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan Jayapura Utara serta Kecamatan Abepura dimekarkan menjadi satu wilayah administrasi sendiri yaitu Kotamadya Jayapura; pada tahun 2003 Kabupaten Jayapura kembali memekarkan wilayahnya menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu wilayah Kecamatan Sarmi, Bonggo, Pantai Barat, Pantai Timur, Mamberamo Hilir dan Mamberamo Hulu yang termasuk dalam Wilayah Pembangunan IV dan IV (atau Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Sarmi) menjadi satu Kabupaten Pemekaran Sarmi; wilayah Pembantu Bupati Wilayah Keerom yang meliputi Kecamatan Arso, Skanto,

Waris, Senggi dan Web menjadi satu Kabupaten Pemekaran Keerom; dan Kabupaten induk Jayapura yang merupakan Kabupaten Jayapura saat ini.

Secara Administrasi, Kabupaten Jayapura terbagi dalam 16 Distrik (5 Distrik pemekaran tahun 2003, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2003, dan Perda Nomor 12 Tahun 2003), pada tahun 2006 melalui Perda Nomor 2 Tahun 2006 Kabupaten Jayapura memekarkan wilayah menjadi 19 distrik dengan jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Jayapura sebanyak 132 Kampung/Kelurahan yang terdiri dari 127 Kampung/Desa dan 5 Kelurahan.

Sampai saat ini tata ruang yang dipakai adalah Tata Ruang Wilayah tahun 1994 atau sebelum pemekaran, sehingga sudah tidak up to date lagi dan perlu direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Rencana detail per kawasan juga belum tersedia, sementara yang sudah tersedia hanya Rencana Detail Kota Sentani, itupun masih harus dikaji ulang dan dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah serta disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat. Penataan batas wilayah adat juga belum tersedia secara tertulis yang sering mengakibatkan terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah, se

Sebagai salah satu wujud upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya,

maka pemerintah Kabupaten Jayapura telah menempuh kebijakan dalam bentuk menerapkan sistem perwilayahan pembangunan di daerah ini, yakni dengan membagi wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura ke dalam 4 (empat) wilayah pembangunan berdasarkan letak geografis masing-masing distrik yang ada di daerah ini. Pada setiap wilayah pembangunan tersebut dikelompokkan beberapa distrik yang berdekatan dan memiliki kondisi wilayah yang relatif sama, baik dilihat dari aspek kondisi geografis maupun kondisi penduduknya, sehingga distrik-distrik yang berada pada wilayah pembangunan yang sama, memiliki potensi sumberdaya alam yang relatif sama pula. Penetapan pola seperti ini tentu akan dapat mewujudkan kemudahan dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pembangunan daerah ini dari tahun ke tahun, sebagaimana yang telah dirancang perencanaannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD) tahunan.

Adapun hasil pembagian wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura pasca pemekaran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sosial budaya dan potensi wilayah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Wilayah Pembangunan I (WP I); meliputi wilayah di sekitar danau Sentani yaitu distrik Sentani, Sentani Timur, Ebungfau dan Waibu. Prioritas wilayah ini adalah Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan dan jasa serta pariwisata danau dan perikanan darat (perairan umum).

Wilayah Pembangunan II (WP II); meliputi wilayah Pantai Utara, yaitu Depapre, Yokari, Demta, Ravenirara, dan Sentani Barat. Wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah penangkapan ikan, tanaman buah-buahan dan pariwisata. Pada wilayah ini tepatnya di Depapre akan dibangun Pelabuhan Peti Kemas.

Wilayah Pembangunan III (WP III); meliputi wilayah dataran Grime, yaitu distrik Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, dan Namblong. Wilayah ini juga merupakan pengembangan Kawasan Agropolitan, dan sangat potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama Coklat.

Wilayah Pembangunan IV (WP IV); meliputi wilayah Nawa, yaitu distrik Kaureh, Unurum Guay, Yapsi dan Airu. Wilayah ini aksesnya relatif sulit dibanding wilayah lainnya di Kabupaten Jayapura, terutama distrik Airu yang hanya dapat diakses dengan transportasi sungai dan udara perintis. Potensi yang dapat dikembangkan di WP

IV ini adalah pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama tanaman kelapa sawit dan coklat, disamping itu wilayah ini juga sangat potensial dengan hasil hutannya seperti kayu, kulit masohi, gaharu dan hasil olahannya. Adanya perkebunan kelapa Sawit PT Sinar Mas membuat peredaran uang di wilayah ini cukup tinggi, namun akses jalan masih relatif sulit sehingga wilayah ini termasuk dalam kategori daerah tertinggal.

Tabel 4.12
Pembagian Wilayah Pembangunan
Kabupaten Jayapura

| Wilayah Pembangun | Kawasan | Distrik | Prioritas |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| I | Cagar Alam Cycloop dan Danau Sentani | Sentani Timur Sentani Ebungfau Waibu | Pusat Pemerintahan Perdagangan Bandara Udara Pariwisata Industri Kecil |
| II | Cagar Alam Cycloop dan Pesisir | Raveni Rara Depapre Sentani Barat Yokari | Pengembangan Pelabuhan Pariwisata Industri Kehutanan Pertambangan |

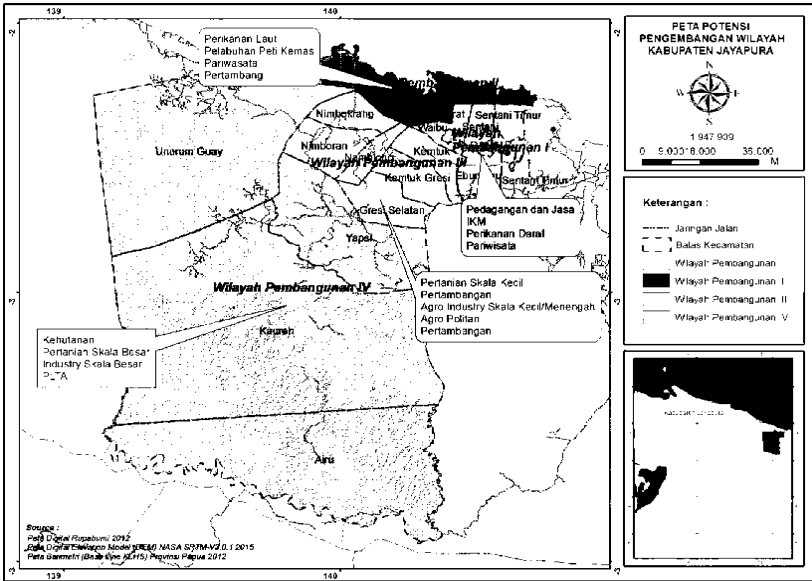
*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | | |
|-----|-------|--|---|
| III | Grime | Kemtuk Kemtuk Gresi Gresi Selatan Nimboran Nimbokra | Pertanian skala rakyat Pternakan skala rakyat Perkebunan (Program |
| IV | Nawa | Unurum Guay Yapsi Kaureh Airu | Kehutanan Perkebunan skala besar PLTA Pertanian skala besar Pternakan |

Sumber: RTRW Kabupaten Jayapura, Tahun 2008-2028

Kebijakan pemerintah dan DPRD Kabupaten Jayapura yang menetapkan 4 (empat) Wilayah Pembangunan daerah ini, yang terdiri dari kawasan Danau Sentani, kawasan Pesisir, Kawasan Grime dan Kawasan Nawa, dengan masing-masing prioritas pengembangan dapat pula disajikan dalam tabel 4.12.

Gambar 4.4
Pembagian Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura



WP I merupakan pusat pelayanan perkotaan di Kabupaten Jayapura, sedangkan Distrik Sentani sebagai daerah pusat pemerintah dan perekonomian memiliki potensi sumber daya manusia dengan jumlah penduduk mencapai 34,84% dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Jayapura. Pada Distrik Sentani juga terdapat Pelayanan transportasi udara, yaitu Bandar Udara Sentani dengan ukuran kelas 1 dan kapasitas Boeing 737 seri 500 serta jam operasi Bandar Udara Sentani dimulai pagi hingga malam hari. Bandar udara Sentani telah dapat melayani

Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan

penerbangan malam dengan bantuan alat instalasi Approach Lighting System sepanjang 900 m (160 titik lampu). Saat ini pergerakan udara di Provinsi Papua melalui Bandara Udara Sentani mampu didukung dengan sarana penghubung daerah-daerah Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura dan Keerom dan terhubungnya jaringan jalan Sarmi-Demta-Sentani-Jayapura. Wilayah Danau Sentani merupakan salah satu dari lima (5) kawasan unggulan wisata berdasarkan hasil kajian RIPPDA Kabupaten Jayapura, dengan obyek wisata alam (antara lain Pegunungan Cycloops, Danau Sentani, Kali Kemiri, Air Terjun Pos Tujuh) dan wisata peninggalan sejarah (Tugu Mac. Arthur). Selain potensi wisata tersebut, Danau Sentani juga dapat dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air bersih di Kawasan Perkotaan Sentani dan permukiman penduduk di Distrik Waibu, Setani Barat, Sentani Timur, dan Ebungfauw. Pada Distrik Waibu memiliki potensi untuk dikembangkan kawasan permukiman untuk mengalihkan pertumbuhan agar tidak terpusat di Distrik Sentani.

Pada WP II, tepatnya di Distrik Depapre terdapat Teluk Tanah Merah yang berfungsi sebagai pelabuhan bagi masyarakat nelayan setempat yang memiliki potensi kondisi alam untuk dikembangkan menjadi pelabuhan khusus. Sedangkan potensi sumber daya perikanan

di wilayah Pantai Utara Kabupaten Jayapura meliputi perairan dalam dan laut. Sumber daya ikan yang dapat diperoleh adalah ikan pelagis besar, seperti tuna dan cakalang; selain itu adalah ikan demersial, seperti ikan kakap, hiu/cucut, udang dan mutiara. Pada WP II, terdapat dua Kawasan Wisata Unggulan (KWU) yaitu KWU Ekowisata Depapre dengan obyek wisata alam (antara lain Pantai Amay, Pantai Harleem, Pantai Tablanusu, Pantai Eswe Yepa dan Tanjung Tanah Merah, dan Pegunungan Dafonsoro) dan obyek wisata peninggalan sejarah yaitu Gua Disyklupa Dafonsoro dan rangka manusia. KWU kedua ialah KWU Pantai Demta dengan obyek wisata alam (antara lain Agrowisata perkebunan kakao, matoa, pisang barangan, dan Air terjun Kali Biru) dan obyek wisata sosial budaya yaitu pengolahan sagu secara tradisional. Berdasarkan hasil Kajian Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Papua, direncanakan akan dibangun PLTAM Amai di Distrik Depapre sebesar 3.304 kW dan dalam skala mikro akan dibangun PLTA di daerah Distrik Ravenirara.

Berdasarkan Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan Grime Sekori (2004) maka dapat diketahui bahwa WP III memiliki potensi yang besar sebagai sentra produksi pertanian, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, durian, jambu mete, pala dan kelapa. Sehingga

keberadaannya dapat menjadi pemicu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Potensi wisata Pantai Demta memiliki obyek wisata alam (antara lain Pantai Tarfia, Pantai Tanjanu, dan Kali Kecil), obyek wisata sejarah (antara lain Gua Karang Habitat dan Legenda Asal-Usul Orang Demta), dan obyek wisata budaya (antara lain Kehidupan Tradisional Masyarakat Demta). Pada Distrik Nimboran, berdasarkan hasil Kajian Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi Papua, direncanakan akan dibangun PLTAM Genyem sebesar 13.000 kW.

Pada WP IV memiliki potensi perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit yang produksinya mencapai 27.683,25 ton pada tahun 2006 dan kakao mencapai 1.903 ton pada tahun 2006. Bumi Sahaja pada Distrik Yapsi dan Kaureh terdapat potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan produksi perkebunan dengan skala besar, saat ini PT. Sinar Mas Group sudah memulai usaha perkebunan tersebut di sana. Kawasan Wisata Unggulan Alam-Kaureh-Unurum Guay menyediakan wisata alam panorama alam pegunungan, hutan, sungai, gua-gua, dan agrowisata pertanian dan perikanan. Potensi kehutanan rotan dengan tingkat produksi rata-rata per hektar berada pada kisaran 2,75 - 2,062 kg/ha dan kayu

gaharu terdapat di Distrik Unurum Guay, Kaureh, dan Yapsi.

2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Jayapura, antara lain berupa: (1) areal hutan seluas 1.338.390,81 ha. Areal hutan yang ada di daerah ini terdiri dari Hutan Lindung seluas 544.771,1 ha; Hutan Produksi seluas 562.545,58 ha; Suaka/Cagar Alam seluas 15.068 ha; dan Areal Penggunaan Lain seluas 31.499,04 ha.; (2) potensi lahan pertambangan rakyat seluas 255.000 ha, utamanya ada di Kampung Oyengsi, dan Distrik Kemtuk Gresi, Nimbokrang, Sentani, Unurum Guay, dan Kaureh; (3) lahan perumahan seluas 1.589,63 ha; (4) lahan pertanian seluas 14.796 ha; (5) lahan sagu seluas 6.132 ha; (6) lahan Perkebunan seluas 18.470,5 ha dengan potensi seluas 421.714,20 ha; (7) areal kolam dan tambak seluas 45,2 ha dengan potensi yang mencapai luas areal 69.994 ha.

Selanjutnya, dapat pula dilihat panjang garis pantai di Kabupaten Jayapura adalah sekitar 243 mil laut yang terbentang di sepanjang Teluk Tanah Merah, yaitu di kawasan Distrik Demta, Yokari, Depapre, dan Distrik Ravenirara. Tentu ketersediaan

sumberdaya alam ini merupakan suatu potensi yang cukup besar untuk pembangunan pelabuhan laut dalam rangka mendorong percepatan dan kelancaran arus barang dan jasa yang keluar dan masuk ke daerah ini, sehingga aktivitas perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya di daerah ini dapat terdorong peningkatan volumenya di masa datang. Selain itu, tersedia pula Danau Sentani dengan luas yang mencapai 9.630 Ha yang merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor perikanan darat yang berbasis masyarakat untuk menghasilkan berbagai komoditi unggulan daerah, utamanya ikan air tawar, seperti ikan Nila, lele, ikan mas dan ikan gabus.

E. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Jayapura

1. Perkembangan PDRB 2013-2018

Salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk melihat pergerakan ekonomi di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang merupakan total dari nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang ada di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah

tersebut dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya.

Tabel 4.13
Nilai PDRB Kabupaten Jayapura Tahun 2013-
2018 (Juta Rupiah)

| Tahun | Nilai PDRB | |
|-------------|---------------|------------------|
| | ADH Berlaku | ADH Konstan 2010 |
| (1) | (2) | (3) |
| 2013 | 7.041.107,04 | 6.086.192,73 |
| 2014 | 8.450.279,17 | 6.772.032,99 |
| 2015 | 9.976.824,56 | 7.445.581,60 |
| 2016 | 11.510.819,41 | 8.081.681,83 |
| 2017 | 12.844.448,52 | 8.649.564,08 |
| 2018 | 14.522,622,32 | 9.319.120,02 |

Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019)

Selaras dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2018 mengalami peningkatan 7,026 % atau sebesar 8.649.564,08 juta rupiah bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8.081.681,83 juta rupiah. Apabila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya PDRB atas dasar harga konstan ini mengalami peningkatan sebesar 42,11 %.

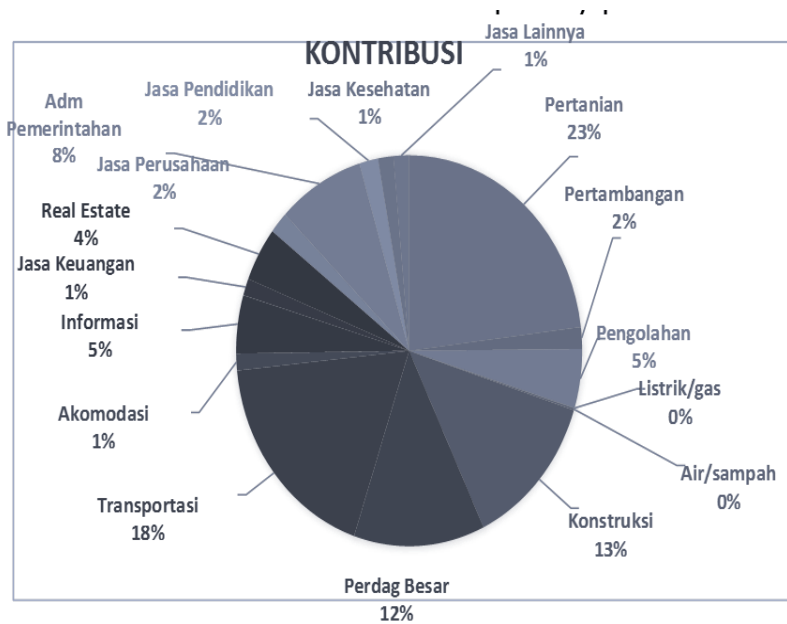
2. Struktur Ekonomi

PDRB terbentuk dari total nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Kegiatan ekonomi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Jayapura tidak mengalami perubahan. Kontributor tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB tahun 2018 di Kabupaten Jayapura adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 23 % atau sebesar 1.918,38 miliar rupiah. Meskipun masih mendominasi struktur perekonomian di kabupaten Jayapura, peranan sektor pertanian lebih rendah dibanding lima tahun sebelumnya yang rata-rata berkontribusi 23,05%.

Berdasarkan gambar berikut, kontribusi terbesar kedua adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 18 % atau sebesar 1.689,65 miliar rupiah dan kontribusinya mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Selanjutnya lapangan usaha Sektor Konstruksi merupakan kontributor terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 13%.

Gambar 4.5 Struktur Perekonomian Kabupaten Jayapura

Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019



Sedangkan kontribusi yang dibawah sepuluh % adalah sector pertambangan, sector Industri, sector penyediaan Akomodasi, sector Informasi dan Komunikasi, sector Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Dua lapangan usaha lainnya yang berkontribusi dibawah satu % terhadap total PDRB adalah sector Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam waktu satu tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura selama kurun waktu lima tahun terakhir berkisar antara 7% hingga 10%. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura mencapai 7,03%, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 8,54%. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang berperan cukup besar pada PDRB Kabupaten Jayapura.

Pada tahun 2018 pertumbuhan PDRB 17 lapangan usaha di Kabupaten Jayapura berada di rentang -1.12 % hingga 10%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,89%, atau meningkat dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan terkecil/penurunan ada pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar -1.12 % atau menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.32 %.

Tabel 4.14
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jayapura
Tahun 2015 – 2018 (%)

| Kategori | Lapangan Usaha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan | 9.17 | 1.82 | 4.19 | 4.66 |
| B | Pertambangan Dan Penggalian | 1.10 | 0.22 | 0.86 | 2.57 |
| C | Industri Pengolahan | 4.12 | 5.78 | 5.68 | 5.15 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.20 | 18.44 | 4.32 | -1.12 |
| E | Daur Ulang | 7.04 | 6.08 | 4.09 | 5.92 |
| F | Konstruksi | 22.28 | 15.34 | 9.83 | 9.67 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6.88 | 6.97 | 5.59 | 8.08 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 10.66 | 15.76 | 10.88 | 9.72 |
| I | Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum | 13.60 | 9.52 | 7.52 | 8.68 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9.15 | 9.05 | 7.92 | 8.60 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6.06 | 9.09 | 3.76 | 9.28 |
| L | Real Estate | 8.38 | 9.94 | 6.46 | 7.23 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 15.32 | 15.06 | 9.28 | 9.30 |

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 7.28 | 8.96 | 7.89 | 9.89 |
| P | Jasa Pendidikan | 7.23 | 8.74 | 6.43 | 8.60 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8.64 | 8.89 | 6.47 | 8.62 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 7.26 | 7.51 | 6.77 | 7.88 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 9.95 | 8.54 | 7.03 | 7.74 |

Pada tahun 2018 sumber terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura disumbang Sektor transportasi dan pergudangan dengan laju pertumbuhan sebesar 10,78 % atau menyumbang sebesar 20,10 % dari total PDRB Hal ini menunjukkan Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten yang sedang giat melakukan aktivitas perekonomian dimana arus barang dan jasa serta manusia menjadi aspek yang sangat penting dalam perkembangan daerah. Lapangan usaha kedua terbesar yang memberikan andil pertumbuhan ekonomi adalah konstruksi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,83% atau sekitar 14,56% dari total PDRB. Demikian juga lapangan usaha jasa perusahaan merupakan kontributor ketiga memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan sebesar 9,28%.

Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang berkontribusi urutan ke empat dalam PDRB memberikan andil pertumbuhan sebesar 7,89%. Sedangkan lapangan usaha pertambangan adalah sector yang sangat kecil dengan laju pertumbuhan sebesar 0,86%.

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk. Namun perhitungan PDRB Perkapita ini masih kasar, belum dapat menunjukkan kondisi riil perekonomian.

PDRB perkapita mengalami trend yang meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya total nilai tambah sektor-sektor ekonomi. Hingga tahun 2017, nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku kabupaten ini telah mencapai 101,96 juta rupiah lebih atau meningkat 9,64 % dari tahun 2016 yang sebesar 92,99 juta rupiah. Bahkan nilai ini telah meningkat 72,02% dari lima tahun sebelumnya (2013) yang saat itu bernilai 59,27 juta rupiah.

**Tabel 4.15 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB
Per Kapita Kabupaten Jayapura, 2014–2018**

| URAIAN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Nilai PDRB (Milliar Rupiah) | | | | | |
| - ADHB | 8,450 | 9,976 | 11,510 | 12,891 | 14,522 |
| - ADHK | 6,772 | 7,445 | 8,081 | 8,649 | 9,319 |
| PDRB per Kapita (Ribu Rupiah) | | | | | |
| - ADHB | 8,450.27 | 9,976.82 | 11,510.81 | 12,891.34 | 14,522.62 |
| - ADHK | 6,772.03 | 7,445.58 | 8,081.23 | 8,649.62 | 9,319.12 |
| - Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 | 11.27 | 9.95 | 8.54 | 7.03 | 7.74 |
| Jumlah Penduduk (ribu orang) | 119,383 | 121,410 | 123,780 | 125,975 | 128,587 |
| Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen) | 0.50 | 1.70 | 1.95 | 1.77 | 2.07 |

Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

F. Perkembangan Lapangan Usaha dan Sub Lapangan Usaha

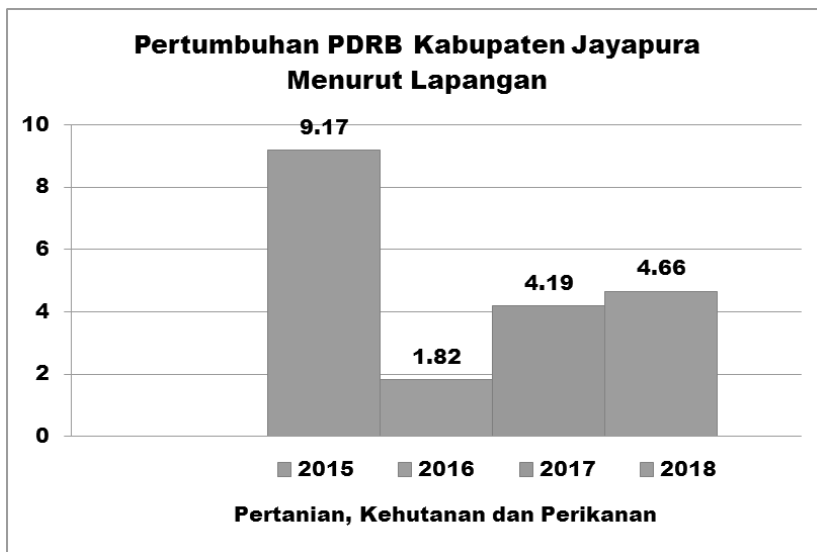
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup Sub lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan.

Pada tahun 2018 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 21,03%. Nilai ini sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu dengan kontribusi sebesar 22,24%.

Meskipun lapangan usaha ini selalu memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB namun kontribusinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sub lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sub sector perikanan 58,99% meningkat dari tahun 2016 sebesar 4,06%, disusul sub pertanian, peternakan, perburuan dan perikanan tercatat sebesar 30,7%. Nilai kontribusi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya yang berkontribusi 30,11%. Sedangkan sub lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan kayu berkontribusi 16,50 % dari seluruh nilai tambah pertanian.

Gambar 4.6
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan Tahun 2015-2018 (%)



Pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2018 sebesar 4.66%. Angka tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 0,53%. Peningkatan pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan pada hampir semua sub kategorinya. Sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu yang berperan sangat besar terhadap lapangan usaha Pertanian Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2018 tumbuh

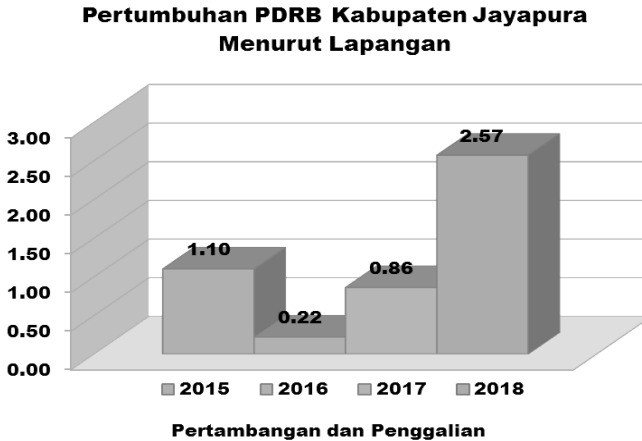
sebesar 17,42 %. Disusul oleh sub usaha perikanan sebesar 13,33 dan sub pertanian, and peternakan perburuan dan jasa pertanian sebesar 7, 88 %.

2. Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Jayapura hanya ada dua yang memberikan kontribusi dari empat sub usaha, yaitu; pertambangan bijih logam; pertambangan dan penggalian lainnya.

Peranan lapangan usaha Pertambangan dan penggalian memang sangat kecil bagi PDRB Kabupaten Jayapura yaitu rata-rata hanya sebesar 1,79% terhadap total PDRB. Pada tahun 2018 kontribusi lapangan usaha ini hanya sebesar 1,44%. Jika dilihat per sub lapangan usahanya, sub lapangan usaha Pertambangan dan penggalian lainnya merupakan penyumbang terbesar. Kontribusinya sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara sub lapangan usaha pertambangan bijih logam menunjukkan pertumbuhan yang negative (0,4%), sedangkan minyak dan batu bara belum di eksplorasi untuk dikembangkan.

Gambar 4.7 Pertumbuhan Lapangan Usaha
Pertambangan Tahun 2015-2018 (%)



Dalam kurun lima tahun terakhir lapangan usaha pertambangan dan penggalian rata tumbuh di kisaran 0-1 %, namun tren nya cenderung menurun. Pada tahun 2018 pertumbuhannya sebesar 2.57% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,86%. Sub-lapangan usaha pertambangan dan penggalian lainnya juga memiliki pertumbuhan yang sejalan dengan lapangan usahanya.

3. Industri Pengolahan

Lapangan usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Jayapura terdiri dari 12 dari 16 sub lapangan usaha.

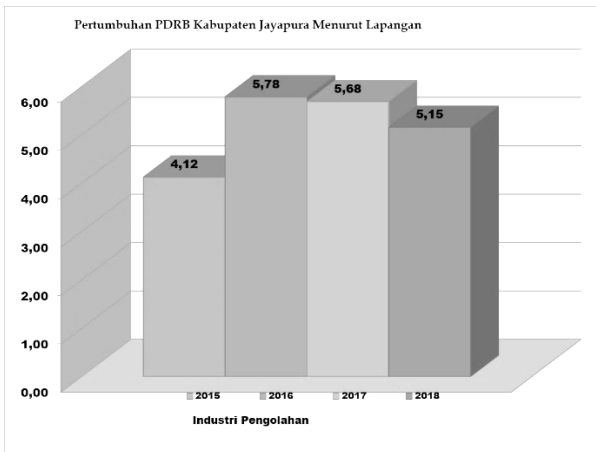
Diantaranya industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari rotan dan bambu; industri dari kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman; industri kimia farmasi dan obat tradisional; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri barang dari logam, barang elektronik, optic dan peralatan listrik; computer; serta industri furniture; industri pengolahan lainnya.

Pada lapangan usaha Industri Pengolahan, sub lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar pada tahun 2017 adalah Industri kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu dan sejenisnya sebesar 45,25% sedikit menurun bila dibandingkan tahun lalu yang sebesar 47,14%. Penurunan peranan ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhannya dari 6,9% menjadi 4,1%. Peranan terbesar kedua dan ketiga adalah sub lapangan usaha Industri makanan dan minuman sebesar, serta Industri kertas dan barang dari kertas percetakan dan reproduksi media rekaman yaitu sebesar 38,38%, serta 2,56%. Sedangkan sub lapangan usaha yang lain hanya berperan kurang dari 1%.

Pertumbuhan Lapangan usaha Industri Pengolahan selama empat tahun terakhir mengalami trend pertumbuhannya cenderung menurun sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 pertumbuhannya sebesar 5,78% dan terus menurun sampai tahun 2018. Sebesar 5,15%.

Pada Tahun 2017 sub lapangan usaha dalam lapangan usaha industri pengolahan tumbuh rata-rata dibawah 20%. Sub lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri furniture sebesar 13,95 diikuti Industri tekstil dan pakaian jadi yaitu sebesar 13,48%, kemudian Industri barang galian buka logam sebesar 10,64 %.

Gambar 4.8 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun 2015- 2018 (%)

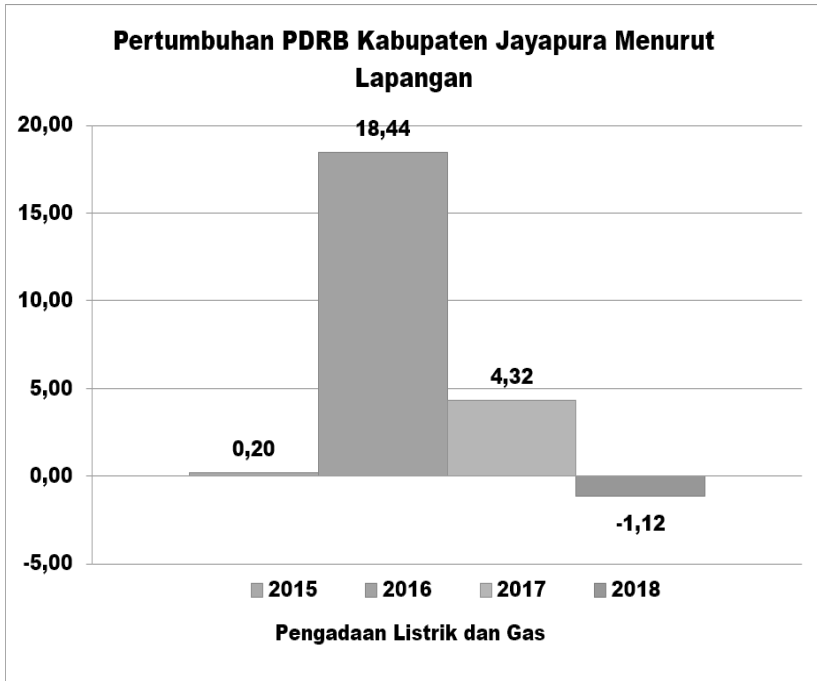


4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas hanya berkontribusi dibawah 1%, yaitu sebesar 0,04% terhadap perekonomian Kabupaten Jayapura pada tahun 2017. Kontribusi yang sangat kecil tersebut disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura secara merata di 19 distrik. Padahal listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar dapat membangun sarana pendukung agar listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Dari kontribusi tersebut, sebanyak 96,78% disumbangkan oleh sub lapangan usaha Ketenagalistrikan, dan 3,22% oleh Pengadaan Gas dan Produksi Es. Dari tahun ke tahun sub lapangan Ketenagalistrikan masih mendominasi lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas di karena di Kabupaten Jayapura belum memiliki sarana pengadaan gas.

Gambar 4.9 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2015- 2018 (%)

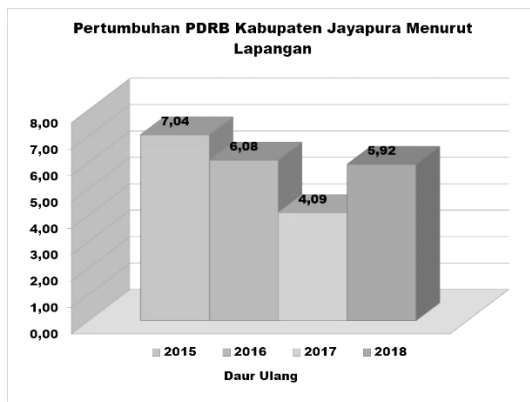


Laju pertumbuhan lapangan usaha Pengadaan listrik dan Gas pada tahun 2017 sebesar 4,32% atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,44%. Jika dilihat dari sub lapangan usahanya, sub lapangan usaha ketenagalistrikan tumbuh sebesar 28,2%. Sedangkan sub lapangan usaha Pengadaan Gas dan Produksi Es tumbuh stagnan di angka 7,11%.

5. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Tahun 2018 kontribusi lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,15% terhadap total perekonomian Kabupaten Jayapura. Kontribusi ini elatif konstan dari tahun sebelumnya .Sejak tahun 2013 kontribusi lapangan usaha ini menunjukkan trend yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah masih perlu memperhatikan lapangan usaha ini dikarenakan distribusi air yang belum merata serta pengelolaan sampah dan limbah yang belum dikelola dengan baik sehingga perlu lebih memperhatikan

Gambar 4.10 Pertumbuhan Lapangan Usaha Daur Ulang Tahun 2015- 2018 (%)



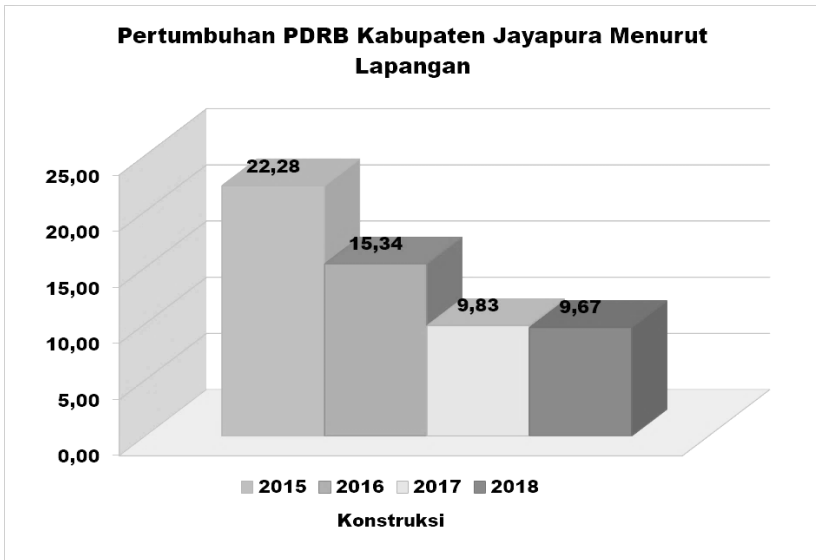
Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan

6. Konstruksi

Tahun 2015 kontribusi lapangan usaha Konstruksi sebesar 22,28%. Namun terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 9,67%.

Gambar 4.11 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi Tahun 2015- 2018 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

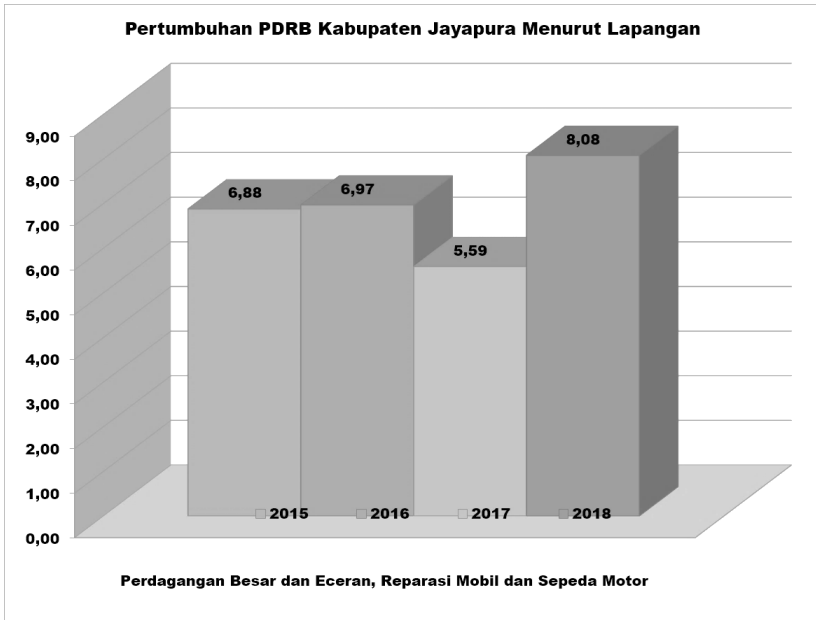
Selama 5 tahun terakhir, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi 12,21% terhadap perekonomian Kabupaten Jayapura. Pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 11,84%. Semenjak tahun 2013 kontribusi lapangan usaha ini cenderung mengalami penurunan terus menerus. Namun masih berkisar di angka 11-12 %.

Dengan kontribusi 12,21% terhadap PDRB, 75,62% disumbang oleh sub lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan sub lapangan usaha perdagangan mobil sepeda motor dan reparasinya memberikan kontribusi sebesar 24,38%. Sejak tahun 2013 kontribusi sub lapangan usaha ini cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya sub lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan.

Gambar berikut menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2017 sebesar 5,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhan ini sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 6,97%. Jika dilihat dari sub lapangan usahanya, pertumbuhan sub lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran

laju pertumbuhannya rata-rata selama lima tahun terakhir berkisar 9%. Sedangkan untuk perdagangan mobil dan sepeda motor 8%. Tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 8,08%.

Gambar 4.12 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2015- 2018 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

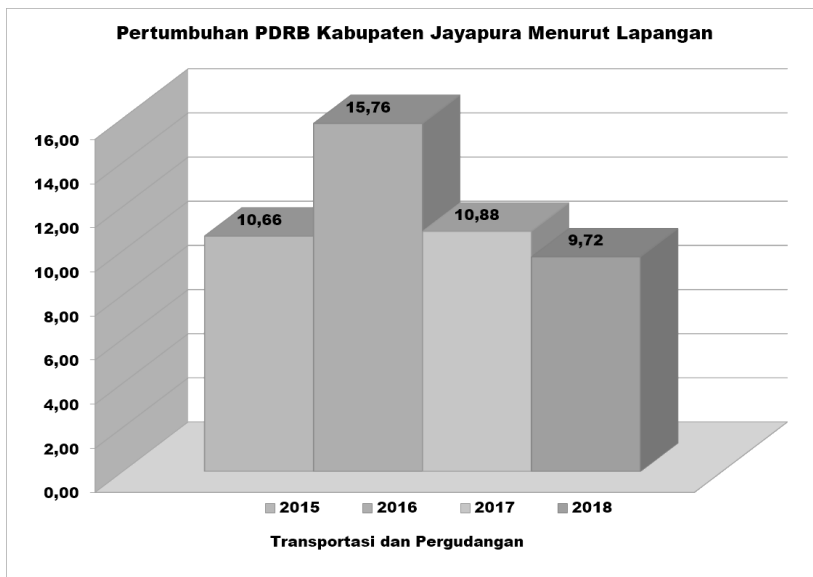
8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Namun yang ada di Kabupaten Jayapura hanya 5 sub lapangan usaha yaitu: Angkutan Darat, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir.

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan berkontribusi sangat kecil terhadap PDRB Kabupaten Jayapura. Kontribusinya selama lima tahun ini selalu di atas 17%. Pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha ini 20,10%.

Sub lapangan usaha Angkutan udara memberikan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir. Nilai kontribusi terhadap lapangan usaha ini sebesar 55,37% pada tahun 2017. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah sub lapangan usaha Angkutan darat sebesar 30,20%. Kemudian disusul oleh lapangan usaha angkutan laut sebesar 5,17% terhadap nilai tambah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan.

Gambar 4.13 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Transportasi dan Pergudangan Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

Pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,88% menurun jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 15,76%. Sub lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi selama tahun 2017 adalah angkutan sungai, danau dan penyerangan dengan pertumbuhan 14,22%. Sedangkan sub lapangan usaha angkutan udara dan pergudangan dan jasa penunjang angkutan pada tahun 2017 masing- masing tumbuh sebesar 13,69% dan 12,26%.

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

Pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 9,72%.

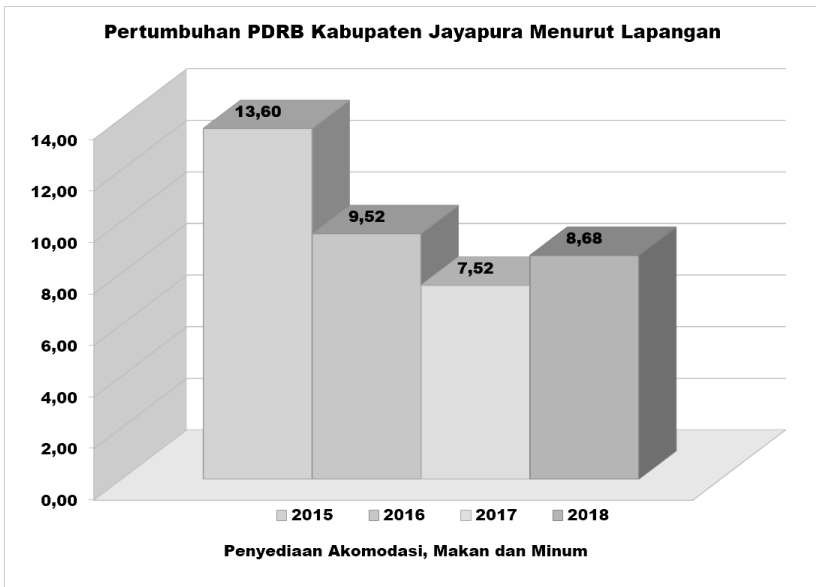
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berperan sangat kecil terhadap PDRB Kabupaten Jayapura. Selama 5 tahun terakhir kontribusinya rata-rata 1,392. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 1,43% atau sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,41%. Jika dilihat dari sub lapangan usahanya, sub lapangan usaha Penyediaan akomodasi sangat besar terhadap nilai tambah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 90,04%. Sedangkan sub lapangan usaha Penyediaan makan minum hanya berkontribusi sangat kecil yaitu 10,96% terhadap nilai tambah lapangan usaha ini.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum rata-rata 12,09%. Pada tahun 2017 pertumbuhannya sebesar 12,61% atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,52%. Pertumbuhan sub lapangan usaha penyediaan akomodasi selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sub lapangan usaha penyediaan makan minum. Sub lapangan usaha Penyediaan akomodasi rata-rata

tumbuh di kisaran 16,4%. Pada tahun 2017 sub lapangan ini tumbuh sebesar 27,25%. Sedangkan sub lapangan usaha Penyediaan makan dan minuman rata-rata tumbuh di kisaran 8,7%. Pada tahun 2017 sub lapangan usaha ini tumbuh sebesar 10,75%. Pada tahun 2018 pertumbuhan untuk lapangan usaha ini sebesar 8,68 %.

Gambar 4.14 Pertumbuhan Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2015-2018 (%)



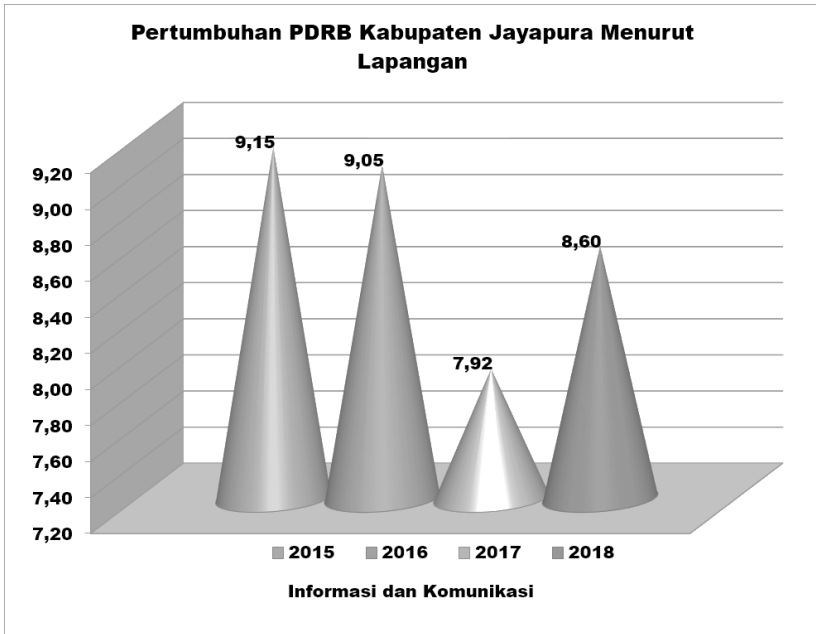
(Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019)

10. Informasi dan Komunikasi

Peran Lapangan usaha informasi dan komunikasi terhadap perekonomian di Kabupaten Jayapura sangat kecil rata-rata hanya sebesar 4,82%. Masih terbatasnya sarana Informasi dan Komunikasi di beberapa daerah menyebabkan peranan lapangan usaha ini belum optimal. Bahkan di beberapa daerah yang masih terpencil belum ada sinyal HP untuk komunikasi. Pada tahun 2017 lapangan usaha ini hanya berperan 4,87% dalam perekonomian Kabupaten Jayapura.

Dalam kurun waktu lima tahun Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh rata-rata sebesar 11%. Pada tahun 2017 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 13,18 %. Pertumbuhan ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh sebesar 9,05 %. Pada tahun 2018 pertumbuhan mengalami kenaikan menjadi 8,60 %.

Gambar 4.15 Pertumbuhan Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi Tahun 2015-2018 (%)



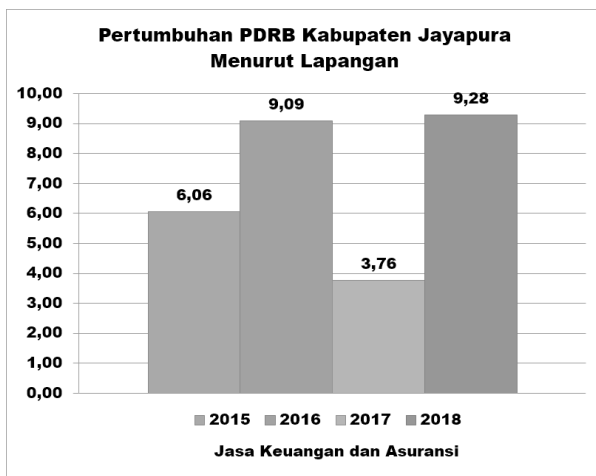
Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Jayapura hanya terdiri dari tiga sub lapangan usaha, yaitu sub lapangan usaha jasa perantara keuangan; sub lapangan asuransi pension dan sub lapangan usaha jasa keuangan lainnya. Kontribusi lapangan usaha ini masih sangat kecil yaitu selalu dibawah 2%. Pada tahun

2017 kontribusi lapangan usaha ini hanya sebesar 1,32% atau sedikit menurun bila dibandingkan dengan kontribusi tahun lalu yang sebesar 1,36%. Sub lapangan usaha Jasa Perantara Keuangan menjadi kontributor terbesar dalam lapangan usaha ini. Kontribusi sub lapangan usaha ini mencapai 1,4% setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 87,75% terhadap total nilai tambah lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Sedangkan sub lapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya hanya berkontribusi sekitar 12,25% tiap tahun. Pada tahun 2018 pertumbuhan mencapai 9,28%.

Gambar 4.16 Pertumbuhan Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Tahu 2015-2018 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2018

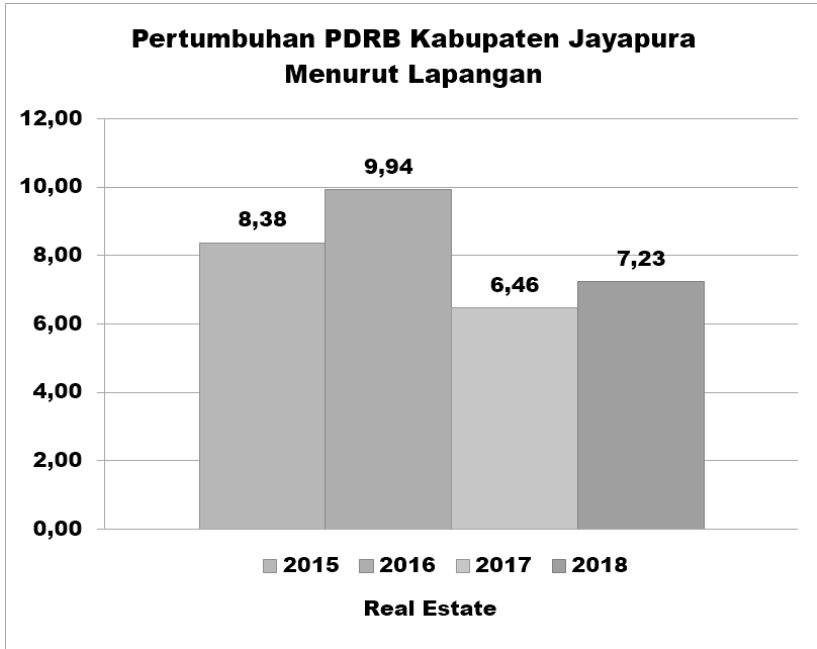
*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

Jika dilihat atas dasar harga konstan, pertumbuhan lapangan usaha jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun 2017 sebesar 3,76%, dengan sub lapangan usaha Jasa perantara keuangan tumbuh 12,97% dan jasa keuangan lainnya tumbuh 9,27%. Pertumbuhan tertinggi lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 16,91%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai pertumbuhan 3,76%. Naik dan turunnya pertumbuhan lapangan usaha ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi jasa perantara keuangan khususnya bank.

12. Real Estate

Lapangan usaha real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil dan perlahan mulai meningkat kontribusinya bagi PDRB Kabupaten Jayapura dengan peranan kurang dari 5%. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 4,41% atau mengalami penurunan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya.

Gambar 4.17 Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estate Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

Pertumbuhan lapangan usaha Real Estate mulai tahun 2014 cenderung melambat. Pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 6,46% atau melambat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,94%. Pada tahun 2018 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 7,23%.

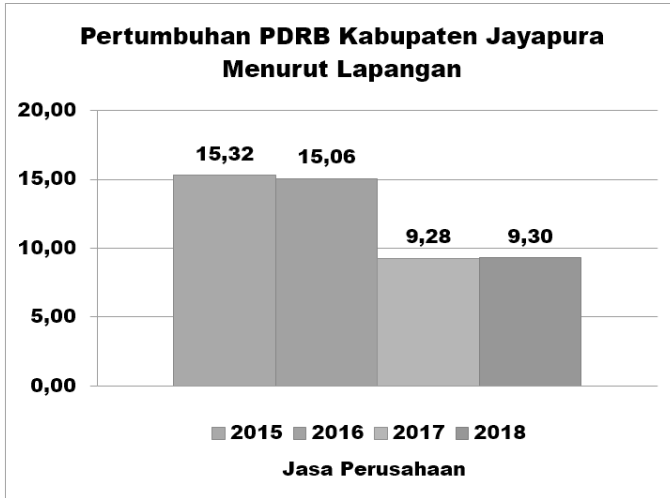
13. Jasa Perusahaan

Peranan lapangan usaha ini terhadap PDRB Kabupaten Jayapura terhitung sangat kecil selama lima tahun terakhir hanya dibawah 2% dibandingkan lapangan usaha yang lain. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada Lapangan usaha jasa perusahaan stagnan di angka 1,79%. Kecilnya peranan lapangan usaha ini karena belum banyak berkembangnya kegiatan ekonomi di lapangan usaha ini.

Pertumbuhan lapangan usaha Jasa Perusahaan selama lima tahun terakhir berada pada kisaran 9% hingga 15% dengan rata-rata per tahun selama lima tahun terakhir 10,6 . Pada tahun 2017 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 11,31% atau sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 9,94%.

Pada tahun 2018 pertumbuhan lapangan usaha untuk jasa perusahaan mengalami keniakan sedikit dari tahun 2017 menjadi 9,30%.

Gambar 4.18 Pertumbuhan Lapangan usaha Jasa Perusahaan Tahun 2015-2018 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

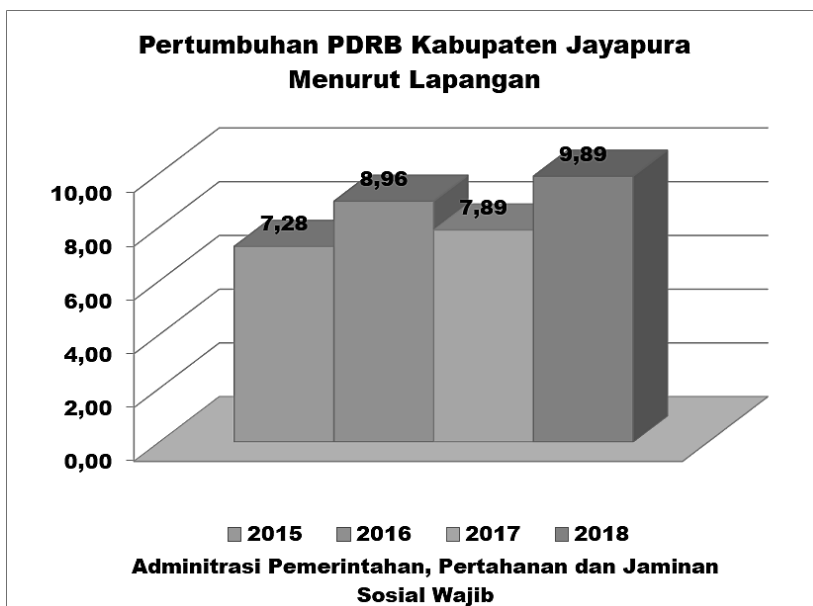
Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Selama kurun waktu Lima tahun terakhir lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memberikan berkontribusi sebesar 8% per

tahun. Pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 7,99% terhadap nilai total PDRB Kabupaten Jayapura. Kontribusi lapangan usaha ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 7,91%.

Pada tahun 2018 pertumbuhan lapangan usaha sebesar 9,89% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,89%.

Gambar 4.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2015-2018 (%)

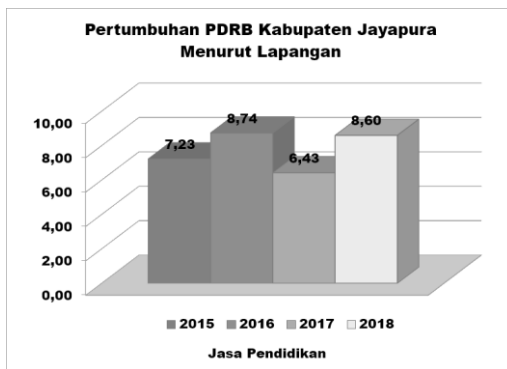


Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

15. Jasa Pendidikan

Lapangan usaha Jasa Pendidikan berkontribusi relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Jayapura. Selama ini kontribusinya stagnan di bawah 2%. Pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 1,64%. Kontribusi ini sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,66%. Pertumbuhan lapangan usaha Jasa Pendidikan rata-rata cukup tinggi yaitu sekitar 10,6%. Pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 10,45% atau sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 8,74%. Pertumbuhan untuk jasa pendidikan cukup fluktuatif, pada tahun 2018 sebesar 8,60% mengalami penurunan dari tahun 2017 yang tingkat pertumbuhannya sebesar 6,43.

Gambar 4.20 Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

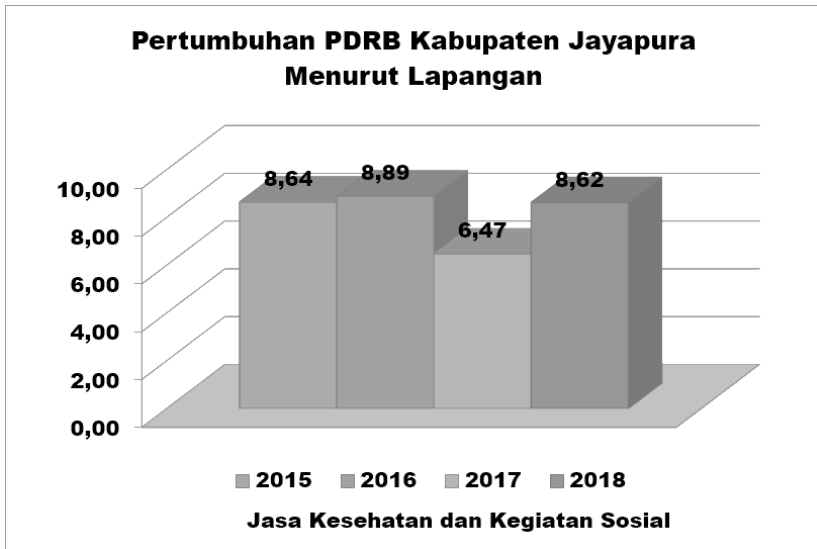
Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDRB cukup kecil hanya dibawah 2% tiap tahunnya. Pada tahun 2017, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Jayapura hanya sebesar 1,40%. Kontribusi lapangan usaha ini sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,42%.

Pertumbuhan rata-rata lapangan usaha ini cukup tinggi yaitu antara 9,3% h selama kurun waktu lima tahun ini. Pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 10,64%. Pertumbuhan ini sedikit mengalami percepatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,89%. Pada tahun 2018 pertumbuhan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,62% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,47%.

Gambar 4.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2018

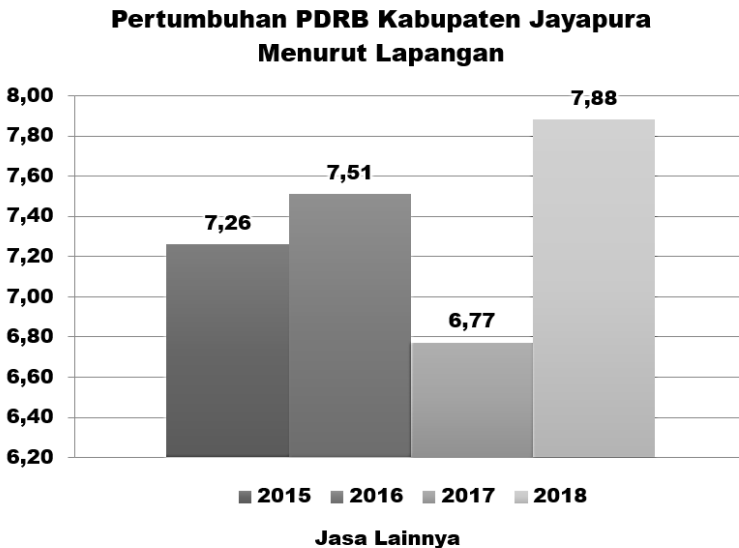
17. Jasa Lainnya

Kontribusi lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Jayapura masih sangat kecil. Kontribusinya selama ini hanya stagnan di kisaran angka 1% saja. Pada tahun 2017 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 1,36% atau sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontribusi 1,38%. Pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya selama kurun waktu lima tahun terakhir cukup fluktuatif di kisaran 6% hingga 11%. Pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

ini sebesar 6,77%. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,51%.

Gambar 4.22 Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2019

G. PDRB Menurut Tiga Kelompok Lapangan Usaha

Selain itu, dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, tujuh belas lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer

Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

2. Lapangan Usaha Sekunder

Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta lapangan usaha konstruksi.

3. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan

sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya. Selama periode lima tahun terakhir kontribusi lapangan usaha primer paling besar dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Jayapura.

Bagian 5

Analisis Sektor dan Produk Unggulan

A. Analisis Sektor Unggulan Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah atau daerah setiap kurun waktu tertentu. Dengan demikian, melalui analisis PDRB ini maka dapat diketahui struktur perekonomian dan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, analisis PDRB ini juga dapat diarahkan untuk mengetahui kinerja masing-masing sektor ekonomi dan untuk membandingkan perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu, serta membandingkan perekonomian dengan daerah lain. Berdasarkan kegunaannya tersebut, PDRB dapat memberikan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi “proses perembesan ke bawah (*trickle down effect*)” akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial. Iidentifikasi sektor ekonomi unggulan sangat penting sebagai awal dan dasar pertimbangan untuk melakukan perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan melalui optimalisasi sektor unggulan tersebut yang diharapkan

memberikan efek yang positif bagi kemajuan aktivitas perekonomian daerah.

Kajian ini dibangun atas dasar kerangka pemikiran bahwa pembangunan daerah (*local development*) merupakan upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah (*growth*) dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (*sustainability*). Dengan demikian, pembangunan daerah akan sangat tergantung dengan potensi daerah dan karakteristik geografis daerah yang dimiliki. Untuk mengidentifikasi sektor potensial ekonomi wilayah dapat dilihat dari keunggulan komparatif (*comparative advantage*), keunggulan kompetitif (*competitiveness advantage*), sektor unggulan (*leading sector*) daerah tersebut, terhadap sektor yang sama dalam pembangunan regional dan lokal untuk dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut disampaikan tabel yang berisi fokus rancangan strategi yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengembangan sektor dan produk unggulan daerah Jayapura.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sistem otonomi daerah menggantikan sistem sentralistik. Dengan kondisi yang demikian, maka masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah

untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan dan kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Potensi daerah satu dengan daerah lainnya pasti berbeda-beda, karena hal ini terkait dengan karakteristik masing-masing daerah tersebut. Sehingga dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous depelovment*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Berikut data mengenai PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2018.

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

Tabel 5.1
PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah) Tahun 2013-2018

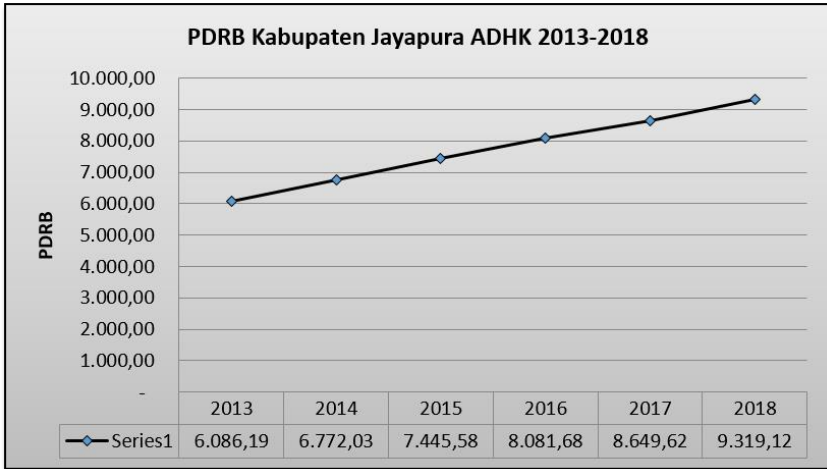
| Kategori | Lapangan Usaha | Produk Domestik Regional Bruto | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,487.83 | 1,655.60 | 1,807.38 | 1,840.34 | 1,917.38 | 2,006.68 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 173.84 | 175.03 | 176.95 | 177.35 | 178.87 | 183.47 |
| C | Industri Pengolahan | 334.95 | 365.05 | 380.11 | 402.54 | 424.92 | 446.80 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.41 | 2.68 | 2.69 | 3.18 | 3.32 | 3.28 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 12.18 | 13.22 | 14.15 | 15.01 | 15.63 | 16.55 |
| F | Konstruksi | 650.01 | 772.39 | 944.44 | 1,089.33 | 1,196.45 | 1,312.11 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 828.65 | 889.70 | 950.92 | 1,017.72 | 1,074.03 | 1,160.83 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 875.25 | 963.88 | 1,066.63 | 1,234.77 | 1,369.07 | 1,502.10 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 77.79 | 88.61 | 100.66 | 110.24 | 118.54 | 128.83 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 334.57 | 371.25 | 405.21 | 441.90 | 476.91 | 517.93 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 83.40 | 97.51 | 103.41 | 112.81 | 117.05 | 127.91 |
| L | Real Estate | 289.95 | 314.08 | 340.40 | 374.22 | 398.40 | 427.22 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 109.06 | 130.30 | 150.27 | 172.90 | 188.95 | 206.51 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 488.33 | 563.05 | 604.03 | 658.13 | 710.08 | 780.32 |
| P | Jasa Pendidikan | 135.62 | 148.52 | 159.26 | 173.18 | 184.31 | 200.17 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 96.01 | 104.76 | 113.82 | 123.94 | 131.96 | 143.33 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 106.26 | 116.31 | 125.17 | 134.57 | 143.68 | 155.00 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 6,086.19 | 6,772.03 | 7,445.58 | 8,081.68 | 8,649.62 | 9,319.12 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa PDRB untuk seluruh kategori lapangan usaha selama tahun 2013-2018 mengalami peningkatan. Sumbangan paling besar adalah dari Pertanian, Kehutanan dan Pertanian sedangkan terkecil adalah dari Pengadaan Listrik dan Gas.

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

Gambar 5.21
Perkembangan PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2013-2018



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB secara total di Kabupaten Jayapura sejak tahun 2013-2018 terjadi perkembangan yang cukup signifikan dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. Secara umum setiap sektoral mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB dari tahun-ketahun. Jumlah PDRB tahun 2013 sejumlah 6,086 miliar rupiah menhadi 9,319 miliar rupiah.

Selama empat tahun terakhir sektor pertanian memiliki kontribusi cukup besar jika dibandingkan dengan sektor

lain. Sampai tahun 2018, sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Jayapura. Sebesar 21,53% perekonomian Jayapura didominasi oleh sektor pertanian, selanjutnya sektor transportasi yang memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 16,12%, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 14,08%. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB Kabupaten Jayapura yakni sebesar 0,04%.

Tabel 5.2
Distribusi PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2015-2018

| Kategori | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 24.27 | 22.77 | 22.17 | 21.53 |
| B | Pertambangan dan Penggalan | 2.38 | 2.19 | 2.07 | 1.97 |
| C | Industri Pengolahan | 5.11 | 4.98 | 4.91 | 4.79 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| F | Konstruksi | 12.68 | 13.48 | 13.83 | 14.08 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12.77 | 12.59 | 12.42 | 12.46 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 14.33 | 15.28 | 15.83 | 16.12 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 5.44 | 5.47 | 5.51 | 5.56 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.39 | 1.40 | 1.35 | 1.37 |
| L | Real Estate | 4.57 | 4.63 | 4.61 | 4.58 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 2.02 | 2.14 | 2.18 | 2.22 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan | 8.11 | 8.14 | 8.21 | 8.37 |
| P | Jasa Pendidikan | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.15 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.54 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019

Meskipun sektor pertanian masih sangat dominan, tetapi kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan sampai tahun 2018 hingga mencapai angka 21,53% dari 24,27% ditahun 2015. Sebaliknya sektor lain seperti kontruksi dan transportasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan masing-masing dari 12,68% menjadi 14,08% untuk sector konstruksi dan 14,33 menjadi 16,12% untuk sector transportasi dan perdagangan. Untuk sector lain mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura mengalami transformasi dari ketergantungan terhadap sektor pertanian kepada sektor-sektor lainnya, terutama dalam pembangunan sector konstruksi dan transportasi dan perdagangan.

Dengan demikian perubahan kontribusi sektoral yang terjadi seharusnya didasarkan kepada strategi kebijakan pembangunan yang tepat, yaitu strategi yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Karena untuk melaksanakan pembangunan dengan sumberdaya yang terbatas, sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Tabel 5.3
PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan
(Juta Rupiah) Tahun 2013-2018

| Kategori | Lapangan Usaha | Produk Domestik Regional Bruto | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 13,661,800.76 | 14,432,993.60 | 15,192,598.76 | 15,457,882.04 | 16,072,420.77 | 16,601,901.88 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 51,011,146.42 | 49,579,812.96 | 52,911,360.98 | 59,840,372.51 | 62,174,059.72 | 68,712,299.70 |
| C | Industri Pengolahan | 2,299,670.68 | 2,500,125.12 | 2,594,318.94 | 2,710,288.02 | 2,885,410.16 | 3,048,371.65 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 38,232.06 | 41,445.61 | 41,707.81 | 46,654.20 | 48,572.90 | 51,920.50 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 65,339.22 | 69,423.19 | 72,190.82 | 74,626.81 | 79,390.62 | 83,930.14 |
| F | Konstruksi | 11,790,562.10 | 12,800,117.19 | 14,169,447.50 | 15,417,542.10 | 16,215,455.80 | 17,045,729.86 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,031,476.12 | 9,690,708.00 | 10,478,318.24 | 11,202,074.47 | 11,901,553.87 | 12,662,034.07 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,543,954.15 | 5,024,387.13 | 5,506,273.71 | 5,953,889.48 | 6,310,010.91 | 6,825,158.67 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 733,106.79 | 825,282.01 | 887,315.42 | 945,316.85 | 1,002,397.63 | 1,056,636.24 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,269,714.66 | 4,552,997.32 | 4,789,272.94 | 4,952,940.92 | 5,299,285.70 | 5,485,886.54 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,727,308.36 | 1,852,793.71 | 1,901,453.85 | 2,017,043.89 | 2,069,620.99 | 2,180,429.77 |
| L | Real Estate | 2,718,621.64 | 2,938,676.18 | 3,110,768.51 | 3,329,018.10 | 3,515,381.19 | 3,746,188.46 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,300,921.31 | 1,426,419.46 | 1,482,991.10 | 1,567,286.72 | 1,657,680.74 | 1,768,814.27 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,744,145.14 | 10,042,357.60 | 11,135,948.77 | 12,209,755.16 | 12,741,836.12 | 13,239,275.80 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,337,126.10 | 2,511,182.22 | 2,692,623.64 | 2,903,515.34 | 3,064,733.42 | 3,192,964.39 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,668,803.01 | 1,824,986.44 | 1,977,551.47 | 2,137,433.00 | 2,248,583.06 | 2,377,349.19 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,176,890.39 | 1,277,526.21 | 1,367,462.41 | 1,455,452.01 | 1,537,235.46 | 1,650,034.49 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 117,118,818.90 | 121,391,233.95 | 130,311,604.86 | 142,221,091.62 | 148,823,629.06 | 159,728,925.61 |

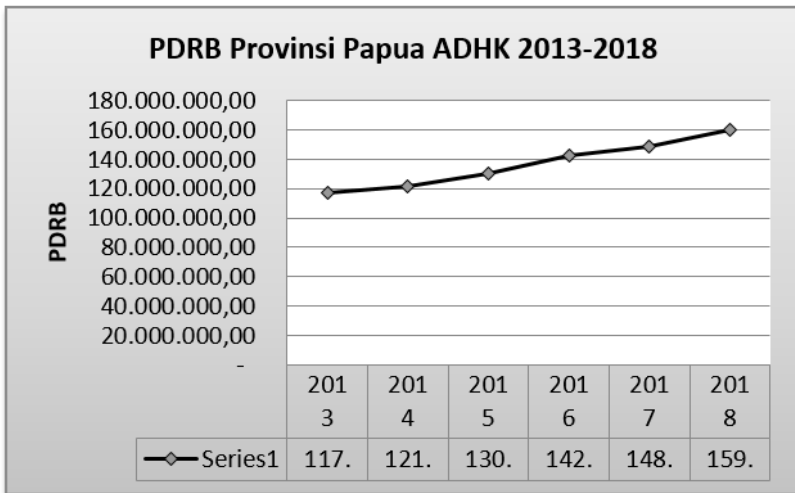
Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Papua untuk seluruh kategori lapangan usaha selama tahun 2013-2018 mengalami peningkatan.

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

Sumbangan paling besar adalah dari Pertambangan dan penggalian sedangkan terkecil adalah dari Pengadaan Listrik dan Gas. Secara keseluruhan seluruh sektor selama tahun 2013-2018 mengalami peningkatan. Peningkatan cukup signifikan adalah pada sector pertambangan dan penggalian, kontruksi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Grafik 5.2
Perkembangan PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2018



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Grafik 5.2 menunjukkan bahwa secara total selama tahun 2013-2018 PDRB Provinsi Papua mengalami pening-

katan walaupun trend peningkatan dari tahun 2013-2014 tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dari 51,011.146,42 juta rupiah menjadi 49.579.812,9 juta rupiah.

B. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah atau kesempatan kerja untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (*economic base*) masyarakat daerah/lokal. Sementara itu yang termasuk kedalam basis ekonomi masyarakat adalah sektor-sektor yang memiliki karakteristik menyangkut tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Analisis LQ memberikan kerangka pengertian tentang stabilitas dan fleksibilitas perekonomian masyarakat untuk merubah kondisi melalui penyelidikan terhadap derajat industri-industri atau sektor-sektor yang ada dilingkungan masyarakat.

Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi industri ekspor atau *basic industry*, dimana industri tersebut memiliki karakteristik dapat membawa sejumlah unit uang kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa, industri yang seperti ini kemudian dikenal dengan

nama industri-industri basis (*basic industries*). Sementara itu industri-industri yang bergerak men-supply barang dan jasa untuk kegunaan konsumsi lokal/daerah dinamakan sebagai industri-industri non basis.

Seperti yang telah diketahui di atas bahwa pada dasarnya teori basis ekonomi menekankan pada berbagai aktivitas ekspor (basis) yang mendorong perekonomian dan aktivitas ekonomi daerah bergantung pada pertumbuhan (atau pengurangan) dari aktivitas ekspor tersebut. Asumsi yang digunakan pada saat menganalisis dengan alat ini adalah bahwa:

- Semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (daerah referensinya), kondisi ini mengasumsikan bahwa pola pengeluaran secara geografis adalah sama.
- Bahwa produktivitas tenaga kerja di seluruh daerah sama
- Setiap industry atau sektor akan menghasilkan produk yang homogen

Analisis LQ pada industri/ sektor tertentu membandingkan share industri/sector tertentu terhadap total tenaga kerja/ouput pada tingkat daerah/lokal dengan share industri/sector yang sama terhadap total tenaga

kerja/output pada tingkat nasional (daerah yang lebih luas, yang disebut dengan daerah referensi). Dimana jika share industri/sector daerah lebih besar dari pada share industri/sector nasional/provinsi maka porsi kelebihan dari output/tenaga kerja tersebut dapat menjelaskan tentang besarnya ekspor yang terjadi.

Metode Location Quotient (LQ) merupakan salah satu pendekatan dalam model ekonomi basis (sector basis) sebagai langkah awal untuk melihat sector ekonomi daerah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian, sehingga nilai LQ digunakan untuk penentuan sector basis yang merupakan sector pendorong tumbuhnya atau berkembangnya sector lain serta berdampak pada penciptaan nilai tambah.

Dalam kajian ini, data yang digunakan dalam analisis LQ, yaitu data PDRB Kabupaten Jayapura dan PDRB Provinsi Papua berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010. Jika nilai $LQ > 1$ maka dapat disimpulkan bahwa sector tersebut merupakan sector basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian wilayah. Sebaliknya, jika nilai $LQ < 1$ maka sector tersebut bukan merupakan sector basis dan kurang

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Jika nilai $LQ_i = 1$ maka sektor i di daerah tersebut memiliki tingkat spesialisasi yang sama dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi atau dengan kata lain sektor tersebut merupakan sektor mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Adapun hasil perhitungan nilai LQ Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini.

**Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ)
Tahun 2013-2018**

| Kategori | Lapangan Usaha | LQ | | | | | | Rata-rata |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.05 | 2.07 | 2.08 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| C | Industri Pengolahan | 2.80 | 2.62 | 2.56 | 2.61 | 2.53 | 2.51 | 2.61 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 1.08 | 1.16 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3.59 | 3.41 | 3.43 | 3.54 | 3.39 | 3.38 | 3.46 |
| F | Konstruksi | 1.06 | 1.08 | 1.17 | 1.24 | 1.27 | 1.32 | 1.19 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.77 | 1.65 | 1.59 | 1.60 | 1.55 | 1.57 | 1.62 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3.71 | 3.44 | 3.39 | 3.65 | 3.73 | 3.77 | 3.62 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.04 | 1.92 | 1.99 | 2.05 | 2.03 | 2.09 | 2.02 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.51 | 1.46 | 1.48 | 1.57 | 1.55 | 1.62 | 1.53 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 1.01 | 0.96 |
| L | Real Estate | 2.05 | 1.92 | 1.92 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.96 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1.61 | 1.64 | 1.77 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 1.82 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 0.99 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.12 | 1.06 | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 0.89 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.11 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1.74 | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.64 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | | | | | | | |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

Berdasarkan hasil perhitungan nilai LQ, dapat diperoleh informasi sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Jayapura yang mempunyai nilai $LQ > 1$, dan nilai $LQ < 1$. Pada tabel berikut dapat dilihat pengelompokan sektor sesuai dengan nilai LQ sebagai berikut:

**Tabel 5.5 Ringkasan Perhitungan
Location Quotient (LQ) Tahun 2013-2018**

| Nilai LQ | Sektor/Lapangan Usaha |
|-----------------|---|
| LQ>1 | <ol style="list-style-type: none">1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan2. Industri Pengolahan3. Pengadaan Listrik dan Gas4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang5. Konstruksi6. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor7. Transportasi dan Pergudangan8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum9. Informasi dan Komunikasi10. Real Estate11. Jasa Perusahaan12. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial13. Jasa lainnya |
| LQ<1 | <ol style="list-style-type: none">1. Pertambangan dan Penggalian2. Jasa Keuangan dan Asuransi3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib4. Jasa Pendidikan |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Hasil analisis LQ, Kabupaten Jayapura secara rata-rata pada tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa ada 13 (tiga belas) sektor/lapangan usaha yang memiliki. Nilai $LQ > 1$, sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian wilayah maka sektor i di daerah tersebut lebih terspesialisasi dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi (Provinsi Papua). Sebaliknya, terdapat 4 (empat) nilai $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Untuk melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, sembilan sektor ekonomi sering dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Sektor Primer. Sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Sektor ini meliputi Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan Penggalian
2. Sektor Sekunder. Sektor yang mengolah bahan baku dari sektor Primer maupun Sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi Sektor Bangunan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

3. Sektor Tersier. Sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Sektor Jasa-jasa.

Sebagaimana pembangunan ekonomi pada umumnya yaitu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional serta terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

C. Analisis *Shift Share* (SSA)

Analisis SSA ini bertolak pada asumsi bahwa pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen, yaitu:

1. *Regional Share* (RS), atau Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), ditujukan untuk mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum. Oleh karena itu nilai RS tetap pada masing-masing sektor ekonomi lokal.

2. Proportional Shift (PS) atau Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
3. Differential Shift (DS) atau Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan yang menunjukkan tingkat kompetisi (*competitiveness*) suatu aktivitas/sektor di Kota Kotamobagu. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Selanjutnya, analisis *shift-share* (SSA) digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah. Hasil analisis *shift share* akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB di Kabupaten Jayapura dibandingkan PDRB Provinsi Papua. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Jika nilai SSA tersebut positif (+), maka dikatakan sektor dalam PDRB

memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Data yang digunakan dalam analisis shift share adalah data PDRB Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua pada dua titik tahun, berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha tahun 2013-2018.

1. Analisis Shift Share Tahun 2013-2014

Berdasarkan analisis SSA seperti pada Tabel 5.6 diperoleh gambaran lebih rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura dengan tahun perbandingan 2013 dan 2014. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa selama tahun 2013-2014, nilai PDRB sektoral kabupaten Jayapura telah mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Tabel 5.6
Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Jayapura
Tahun 2013 – 2014

| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| | | $E'ij - Eij$ | $Eij \times rn$ | $Eij(rin-rn)$ | $Eij(rij-rin)$ | $Nij + Mij + Cij = E5$ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 167.77 | 54.28 | 29.71 | 83.78 | 167.77 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1.19 | 6.34 | (1.46) | (3.69) | 1.19 |
| C | Industri Pengolahan | 30.10 | 12.22 | 16.98 | 0.90 | 30.10 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.27 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1.04 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 1.04 |
| F | Konstruksi | 122.38 | 23.71 | 31.94 | 66.72 | 122.38 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 61.05 | 30.23 | 30.26 | 0.56 | 61.05 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 88.63 | 31.93 | 60.61 | (3.91) | 88.63 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10.82 | 2.84 | 6.94 | 1.04 | 10.82 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 36.68 | 12.20 | 9.99 | 14.48 | 36.68 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 14.11 | 3.04 | 3.02 | 8.05 | 14.11 |
| L | Real Estate | 24.13 | 10.58 | 12.89 | 0.66 | 24.13 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 21.24 | 3.98 | 6.54 | 10.72 | 21.24 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 74.72 | 17.81 | 54.69 | 2.22 | 74.72 |
| P | Jasa Pendidikan | 12.90 | 4.95 | 5.15 | 2.80 | 12.90 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8.75 | 3.50 | 5.48 | (0.24) | 8.75 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 10.05 | 3.88 | 5.21 | 0.96 | 10.05 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 685.83 | 222.02 | 278.39 | 185.42 | 685.83 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), dalam hal ini pertumbuhan PDRB Provinsi Papua telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura sebesar 222,02 miliar rupiah. Nilai positif menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura masih sangat bergantung pada perekonomian Papua.

Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industry yang positif sebesar 278,39 miliar rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Nilai positif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Jayapura cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif cepat/maju, pengaruh efek bauran industry atau sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura cukup berkembang dalam perekonomian Provinsi Papua, ini menunjukkan bahwa dampak struktur ekonomi Provinsi Papua dapat mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura. Pada tabel 5.6, dapat dilihat sektor yang memiliki pengaruh negatif dari komponen bauran industry yaitu, sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki nilai komponen bauran industry positif.

Nilai perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada tabel 5.6 di atas sebesar 185,42 miliar rupiah. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Pengaruh daya saing Papua terhadap perekonomian Jayapura mampu mendorong

pertambahan perekonomian Jayapura sebesar 185,42 miliar rupiah. Terdapat tiga sektor yaitu, sektor pertambangan dan penggalan, transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki nilai negatif sehingga sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat di tingkat Provinsi Papua. Sedangkan empat belas sektor lainnya memiliki nilai keunggulan kompetitif positif. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jayapura.

2. Analisis Shift Share Tahun 2014-2015

Berdasarkan analisis SSA seperti pada Tabel 5.7 diperoleh gambaran lebih rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura dengan tahun perbandingan 2014 dan 2015. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2015, nilai PDRB sektoral kabupaten Jayapura telah mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

**Tabel 5.7 Hasil Analisis Shift Share
Kabupaten Jayapura Tahun 2014 - 2015**

| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nj (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check (Dij) |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | | E ⁱ j - E _j | E _j x r _n | E _j (r _n -r _n) | E _j (r _n -r _n) | N _j + M _j + C _j = E ₅ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 151.78 | 121.66 | (34.53) | 64.65 | 151.78 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1.92 | 12.86 | (1.10) | (9.84) | 1.92 |
| C | Industri Pengolahan | 15.06 | 26.83 | (13.07) | 1.31 | 15.06 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.01 | 0.20 | (0.18) | (0.01) | 0.01 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.93 | 0.97 | (0.44) | 0.40 | 0.93 |
| F | Konstruksi | 172.05 | 56.76 | 25.87 | 89.42 | 172.05 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 61.22 | 65.38 | 6.93 | (11.09) | 61.22 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 102.75 | 70.83 | 21.62 | 10.30 | 102.75 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 12.05 | 6.51 | 0.15 | 5.39 | 12.05 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 33.96 | 27.28 | (8.02) | 14.69 | 33.96 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5.90 | 7.17 | (4.60) | 3.34 | 5.90 |
| L | Real Estate | 26.32 | 23.08 | (4.69) | 7.93 | 26.32 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 19.97 | 9.58 | (4.41) | 14.80 | 19.97 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 40.98 | 41.38 | 19.94 | (20.33) | 40.98 |
| P | Jasa Pendidikan | 10.74 | 10.91 | (0.18) | 0.01 | 10.74 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9.06 | 7.70 | 1.06 | 0.30 | 9.06 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 8.86 | 8.55 | (0.36) | 0.67 | 8.86 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 673.56 | 497.63 | 3.98 | 171.94 | 673.56 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (N_j), dalam hal ini pertumbuhan PDRB Provinsi Papua mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura sebesar 497,63 miliar rupiah. Nilai positif menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura masih sangat bergantung pada perekonomian Papua.

Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industry yang positif sebesar 497,63 miliar rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Nilai positif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Jayapura cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif cepat/maju, pengaruh efek bauran industri/sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura cukup berkembang dalam perekonomian Provinsi Papua, ini menunjukkan bahwa dampak struktur ekonomi Provinsi Papua dapat mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura. Pada tabel 5.7, dapat dilihat sektor yang memiliki pengaruh negatif dari komponen bauran industri yaitu, sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik dan gas, industry pengolahan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan dan jasa lainnya. Sedangkan enam sektor-sektor lainnya memiliki nilai komponen bauran industri positif.

Nilai perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada tabel 5.7 di atas sebesar 171,94 miliar rupiah. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif

yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Pengaruh daya saing Papua terhadap perekonomian Jayapura mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Jayapura sebesar 171,94 miliar rupiah. Terdapat empat sektor yaitu, sektor pertambangan dan penggalian, listrik, perdagangan besar, dan administrasi pemerintahan memiliki nilai negatif sehingga sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat di tingkat Provinsi Papua. Sedangkan tiga belas sektor lainnya memiliki nilai keunggulan kompetitif positif. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jayapura.

3. Analisis Shift Share Tahun 2015-2016

Berdasarkan analisis SSA seperti pada Tabel 5.8 diperoleh gambaran lebih rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura dengan tahun perbandingan 2015 dan 2016. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2016, nilai PDRB sektoral kabupaten Jayapura telah mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Tabel 5.8
Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Jayapura
Tahun 2015 – 2016

| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | $E'_{ij} - E_{ij}$ | $E_{ij} \times r_n$ | $E_{ij}(r/n-r_n)$ | $E_{ij}(r_i/r-n)$ | $Nij + Mij + Cij = E5$ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 32.96 | 165.18 | (133.62) | 1.40 | 32.96 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.40 | 16.17 | 7.00 | (22.77) | 0.40 |
| C | Industri Pengolahan | 22.43 | 34.74 | (17.75) | 5.44 | 22.43 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.49 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.49 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.86 | 1.29 | (0.82) | 0.38 | 0.86 |
| F | Konstruksi | 144.89 | 86.31 | (3.13) | 61.70 | 144.89 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 66.80 | 86.91 | (21.23) | 1.12 | 66.80 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 168.14 | 97.48 | (10.77) | 81.43 | 168.14 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.58 | 9.20 | (2.62) | 3.00 | 9.58 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 36.69 | 37.03 | (23.19) | 22.84 | 36.69 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9.40 | 9.45 | (3.16) | 3.11 | 9.40 |
| L | Real Estate | 33.82 | 31.11 | (7.23) | 9.94 | 33.82 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 22.63 | 13.73 | (5.19) | 14.09 | 22.63 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 54.10 | 55.20 | 3.04 | (4.14) | 54.10 |
| P | Jasa Pendidikan | 13.92 | 14.56 | (2.08) | 1.45 | 13.92 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10.12 | 10.40 | (1.20) | 0.92 | 10.12 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 9.40 | 11.44 | (3.39) | 1.35 | 9.40 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 636.63 | 680.46 | (225.25) | 181.42 | 636.63 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), dalam hal ini pertumbuhan PDRB Provinsi Papua telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura sebesar 680,46 miliar rupiah. Nilai positif menun-

jukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura masih sangat bergantung pada perekonomian Papua.

Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industri yang negatif sebesar (225,25) miliar rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Jayapura cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat, pengaruh efek bauran industri/ sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura tidak cukup berkembang dalam perekonomian Provinsi Papua, ini menunjukkan bahwa dampak struktur ekonomi Provinsi Papua tidak dapat mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura. Pada tabel 5.8, dapat dilihat sektor yang memiliki pengaruh positif dari komponen bauran industri yaitu, sektor pertambangan dan administrasi pemerintahan. Sedangkan lima belas sektor-sektor lainnya memiliki nilai komponen bauran industri negatif.

Nilai perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada tabel 5.8 di atas sebesar 181,42 miliar rupiah. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan per-

ekonomian Kabupaten Jayapura. Pengaruh daya saing Papua terhadap perekonomian Jayapura mampu mendorong pertambahan perekonomian Jayapura sebesar 181,4 miliar rupiah. Terdapat dua sektor yaitu, sektor pertambangan dan penggalian, dan administrasi pemerintahan memiliki nilai negatif sehingga sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat di tingkat Provinsi Papua. Sedangkan lima belas sektor lainnya memiliki nilai keunggulan kompetitif positif. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jayapura.

4. Analisis Shift Share Tahun 2016-2017

Berdasarkan analisis SSA seperti pada Tabel 5.9 diperoleh gambaran lebih rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura dengan tahun perbandingan 2016 dan 2017. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2017, nilai PDRB sektoral kabupaten Jayapura telah mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), dalam hal ini pertumbuhan PDRB Provinsi Papua telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura sebesar 375,21 miliar rupiah. Nilai positif menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura masih sangat bergantung pada perekonomian Papua.

Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industri yang positif sebesar 49,47 miliar rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Nilai positif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Jayapura cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif cepat, pengaruh efek bauran industri/sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura cukup berkembang dalam perekonomian Provinsi Papua, ini menunjukkan bahwa dampak struktur ekonomi Provinsi Papua dapat mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura. Pada tabel 5.9, dapat dilihat sektor yang memiliki pengaruh negative dari komponen bauran industri yaitu, sektor pertanian, pertambangan, listrik, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan. Sedangkan dua belas

sektor-sektor lainnya memiliki nilai komponen bauran industri positif.

Tabel 5.9
Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Jayapura
Tahun 2016 – 2017

| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check (Dij) |
|--------------------------------|--|------------|----------|-------------|--------------|----------------------|
| | | E'ij - Eij | Eij x rn | Eij(rin-rn) | Eij(rij-rin) | Nij + Mij + Cij = E5 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 77.04 | 85.44 | (12.27) | 3.88 | 77.04 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1.52 | 8.23 | (1.32) | (5.40) | 1.52 |
| C | Industri Pengolahan | 22.38 | 18.69 | 7.32 | (3.63) | 22.38 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.14 | 0.15 | (0.02) | 0.01 | 0.14 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.62 | 0.70 | 0.26 | (0.34) | 0.62 |
| F | Konstruksi | 107.12 | 50.57 | 5.81 | 50.74 | 107.12 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 56.31 | 47.25 | 16.30 | (7.24) | 56.31 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 134.30 | 57.32 | 16.53 | 60.44 | 134.30 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8.30 | 5.12 | 1.54 | 1.64 | 8.30 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 35.01 | 20.51 | 10.39 | 4.11 | 35.01 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.24 | 5.24 | (2.30) | 1.30 | 4.24 |
| L | Real Estate | 24.18 | 17.37 | 3.58 | 3.23 | 24.18 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 16.05 | 8.03 | 1.95 | 6.08 | 16.05 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 51.95 | 30.55 | (1.87) | 23.27 | 51.95 |
| P | Jasa Pendidikan | 11.13 | 8.04 | 1.58 | 1.51 | 11.13 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8.02 | 5.75 | 0.69 | 1.57 | 8.02 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 9.11 | 6.25 | 1.31 | 1.55 | 9.11 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 567.42 | 375.21 | 49.47 | 142.74 | 567.42 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Nilai perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada tabel 5.9 di atas sebesar 142,74 miliar rupiah. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Pengaruh daya saing

Papua terhadap perekonomian Jayapura mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Jayapura sebesar 142,74 miliar rupiah. Terdapat empat sektor yaitu, sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, air, dan perdagangan besar memiliki nilai negatif sehingga sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat di tingkat Provinsi Papua. Sedangkan tiga belas sektor lainnya memiliki nilai keunggulan kompetitif positif. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jayapura.

5. Analisis Shift Share Tahun 2017-2018

Berdasarkan analisis SSA seperti pada Tabel 5.10 diperoleh gambaran lebih rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura dengan tahun perbandingan 2017 dan 2018. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2018, nilai PDRB sektoral kabupaten Jayapura telah mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij) dan keunggulan kompetitif (Cij).

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), dalam hal ini pertumbuhan PDRB Provinsi Papua telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura sebesar 633,81 miliar rupiah. Nilai positif menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura masih sangat bergantung pada perekonomian Papua.

Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industri yang positif sebesar 49,47 miliar rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Jayapura cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh relatif lambat, pengaruh efek bauran industri/sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura tidak cukup berkembang dalam perekonomian Provinsi Papua, ini menunjukkan bahwa dampak struktur ekonomi Provinsi Papua belum dapat mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura. Pada tabel 5.10, dapat dilihat sektor yang memiliki pengaruh positif dari komponen bauran industri yaitu, sektor pertambangan, dan sector jasa lainnya. Sedangkan lima belas sektor-

sektor lainnya memiliki nilai komponen bauran industri negatif.

Tabel 5.10
Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Jayapura
Tahun 2017 – 2018

| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | $E'_{ij} - E_{ij}$ | $E_{ij} \times r_n$ | $E_{ij}(r_{in}-r_n)$ | $E_{ij}(r_{ij}-r_{in})$ | $N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} = E_5$ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 89.30 | 140.50 | (77.33) | 26.13 | 89.30 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 4.60 | 13.11 | 5.70 | (14.21) | 4.60 |
| C | Industri Pengolahan | 21.88 | 31.14 | (7.14) | (2.12) | 21.88 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.04 | 0.24 | (0.01) | (0.19) | 0.04 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.92 | 1.15 | (0.25) | 0.03 | 0.92 |
| F | Konstruksi | 115.66 | 87.67 | (26.41) | 54.40 | 115.66 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 86.80 | 78.70 | (10.07) | 18.17 | 86.80 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 133.03 | 100.32 | 11.45 | 21.26 | 133.03 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10.29 | 8.69 | (2.27) | 3.88 | 10.29 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 41.02 | 34.95 | (18.15) | 24.23 | 41.02 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 10.86 | 8.58 | (2.31) | 4.59 | 10.86 |
| L | Real Estate | 28.82 | 29.19 | (3.04) | 2.66 | 28.82 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 17.56 | 13.85 | (1.18) | 4.89 | 17.56 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 70.24 | 52.03 | (24.31) | 42.52 | 70.24 |
| P | Jasa Pendidikan | 15.86 | 13.51 | (5.79) | 8.15 | 15.86 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 11.37 | 9.67 | (2.11) | 3.81 | 11.37 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 11.32 | 10.53 | 0.01 | 0.78 | 11.32 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 669.57 | 633.81 | (163.22) | 198.98 | 669.57 |

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

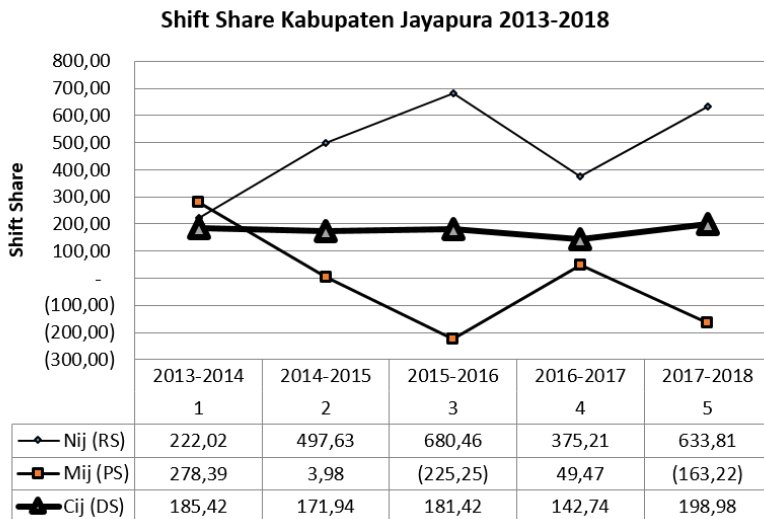
Nilai perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada tabel 5.9 di atas sebesar 198,98 miliar rupiah. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Pengaruh daya saing

Papua terhadap perekonomian Jayapura mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Jayapura sebesar 198,98 miliar rupiah. Terdapat tiga sektor yaitu, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan listrik, memiliki nilai negatif sehingga sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat di tingkat Provinsi Papua. Sedangkan empat belas sektor lainnya memiliki nilai keunggulan kompetitif positif. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB di Kabupaten Jayapura.

6. Analisis Shift Share Tahun 2013-2018

Berdasarkan analisis SSA seperti pada Grafik 5.3 diperoleh gambaran lebih rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Jayapura selama tahun 2017-2018, nilai PDRB sektoral kabupaten Jayapura telah mengalami perubahan atau perkembangan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

Gambar 5.3
Hasil Analisis Shift Share
Tahun 2013-2018



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij) selama tahun 2013-2018 menunjukkan nilai positif namun fluktuatif. Ketergantungan perekonomian Kabupaten Jayapura terhadap perekonomian Provinsi Papua cenderung meningkat pada periode 2013-2015, dan mengalami penurunan ketergantungan pada periode 2015-2016, namun meningkat lagi pada periode 2016-2018. Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi kontribusi

sector-sektor perekonomian Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua.

Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industry. Selama periode 2013-2018 terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan fluktuatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura terjadi pada periode 2013-2014, 2014-2015, dan periode 2016-2017. Sedangkan pengaruh negative terjadi pada periode 2015-2016 dan 2017-2018. Hal ini menunjukkan bahwa dampak struktur ekonomi Provinsi Papua dalam mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura belum stabil. Hal ini dapat terlihat pada fluktuasi nilai Komponen bauran industri (Mij) pada setiap sektor yang juga sangat fluktuatif.

Nilai perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Pengaruh daya saing Papua terhadap perekonomian Jayapura mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Jayapura hal ini dapat dilihat pada nilai komponen keunggulan kompetitif (Cij) yang cukup stabil selama periode 2013-2018.

Bagian 6

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. PDRB untuk seluruh kategori lapangan usaha selama tahun 2013-2018 mengalami peningkatan. Sumbangan paling besar adalah dari Pertanian, Kehutanan dan Pertambangan sedangkan terkecil adalah dari Pengadaan Listrik dan Gas.
2. Selama 2015-2018 sektor pertanian memiliki kontribusi cukup besar jika dibandingkan dengan sektor lain. Sampai tahun 2018, sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Jayapura. Sebesar 21,53% perekonomian Jayapura didominasi oleh sektor pertanian, selanjutnya sektor transportasi yang memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 16,12%, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 14,08%. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB Kabupaten Jayapura yakni sebesar 0,04%.

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

3. Meskipun sektor pertanian masih sangat dominan, tetapi kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan sampai tahun 2018 hingga mencapai angka 21,53% dari 24,27% ditahun 2015. Sebaliknya sektor lain seperti kontruksi dan transportasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan masing-masing dari 12,68% menjadi 14,08% untuk sector konstruksi dan 14,33% menjadi 16,12% untuk sector transportasi dan perdagangan. Untuk sector lain mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jayapura mengalami transformasi dari ketergantungan terhadap sektor pertanian kepada sektor-sektor lainnya, terutama dalam pembangunan sector konstruksi dan transportasi dan perdagangan.
4. Hasil analisis LQ, Kabupaten Jayapura secara rata-rata pada tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa ada 13 (tiga belas) sektor/lapangan usaha yang memiliki. Nilai $LQ > 1$, sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian wilayah maka sektor i di daerah tersebut lebih terspealisasi dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi (Provinsi Papua). Sektor tersebut antara lain: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa lainnya

5. Teridentifikasi 4 (empat) nilai $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak per-ekonomian daerah. Sektor tersebut antara lain: Per-tambangan dan Penggalian, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Pendidikan
6. Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij) selama tahun 2013-2018 menunjukkan nilai positif namun fluktuatif. Ketergantungan perekonomian Kabupaten Jayapura terhadap perekonomian Provinsi Papua cenderung meningkat pada periode 2013-2015, dan mengalami penurunan ketergantungan pada periode 2015-2016, namun meningkat lagi pada periode 2016-2018. Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi kontribusi sector-sektor perekonomian Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua.

7. Komponen bauran industri (Mij) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industri. Selama periode 2013-2018 terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan fluktuatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri memberikan pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura terjadi pada periode 2013-2014, 2014-2015, dan periode 2016-2017. Sedangkan pengaruh negative terjadi pada periode 2015-2016 dan 2017-2018. Hal ini menunjukkan bahwa dampak struktur ekonomi Provinsi Papua dalam mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayapura belum stabil. Hal ini dapat terlihat pada fluktuasi nilai Komponen bauran industri (Mij) pada setiap sector yang juga sangat fluktuatif.
8. Nilai perhitungan komponen keunggulan kompetitif (Cij) mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura. Pengaruh daya saing Papua terhadap perekonomian Jayapura mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Jayapura hal ini dapat dilihat pada nilai komponen keunggulan kompetitif (Cij) yang cukup stabil selama periode 2013-2018.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian beberapa yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Perkembangan PDRB Kabupaten Jayapura yang cenderung mengalami peningkatan harus dibarengi dengan kebijakan strategis dalam mengembangkan sektor unggulan yang memiliki kontribusi tinggi dalam perekonomian Kabupaten Jayapura, sehingga perlu mendapatkan prioritas pengembangan dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya, sehingga dalam jangka pendek, menengah atau panjang dapat memberikan dampak yang tinggi pula bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
2. Sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian wilayah sebagaimana hasil analisis LQ perlu ditingkatkan, sedangkan sector yang bukan basis perlu mendapat perhatian sehingga dapat menjadi sector basis dengan memperhatikan kekuatan dan peluang pengembangan perekonomian di Provinsi Papua.
3. Hasil analisis Shift Share menunjukkan perkembangan yang sangat fluktuatif sehingga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini memungkinkan ketergantungan

perekonomian Kabupaten Jayapura, perubahan perekonomian wilayah sebagai akibat adanya bauran industry, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Asmara, Alla dan Zuliasri, Astri Fikanti. (2014). Industri Unggulan Daerah dalam Perspektif Aglomerasi dan Daya Saing. *Agrimedia*, 19 (2), 30-35.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jayapura dalam Angka, 2017.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jayapura dalam Angka, 2018
- Hg Suseno, Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Per-ekonomian Indonesia, Penerbit Kanisius, 2010.
- Mawardi, I. 1997. Daya Saing Indonesia Timur Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi & Sosial. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. (2001). Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris. Jakarta: Salemba Empat.

PDRB untuk seluruh kategori lapangan usaha selama tahun 2013-2018 mengalami peningkatan. Sumbangan paling besar adalah dari Pertanian, Kehutanan dan Pertanian sedangkan terkecil adalah dari Pengadaan Listrik dan Gas.

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

Lampiran

A. Perhitungan LQ

| Kategori | Lapangan Usaha | Produk Domestik Regional Bruto | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,487.83 | 1,655.60 | 1,807.38 | 1,840.34 | 1,917.38 | 2,006.68 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 173.84 | 175.03 | 176.95 | 177.35 | 178.87 | 183.47 |
| C | Industri Pengolahan | 334.95 | 365.05 | 380.11 | 402.54 | 424.92 | 446.80 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.41 | 2.68 | 2.69 | 3.18 | 3.32 | 3.28 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 12.18 | 13.22 | 14.15 | 15.01 | 15.63 | 16.55 |
| F | Konstruksi | 650.01 | 772.39 | 944.44 | 1,089.33 | 1,196.45 | 1,312.11 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 828.65 | 889.70 | 950.92 | 1,017.72 | 1,074.03 | 1,160.83 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 875.25 | 963.88 | 1,066.63 | 1,234.77 | 1,369.07 | 1,502.10 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 77.79 | 88.61 | 100.66 | 110.24 | 118.54 | 128.83 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 334.57 | 371.25 | 405.21 | 441.90 | 476.91 | 517.93 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 83.40 | 97.51 | 103.41 | 112.81 | 117.05 | 127.91 |
| L | Real Estate | 289.95 | 314.08 | 340.40 | 374.22 | 398.40 | 427.22 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 109.06 | 130.30 | 150.27 | 172.90 | 188.95 | 206.51 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 488.33 | 563.05 | 604.03 | 658.13 | 710.08 | 780.32 |
| P | Jasa Pendidikan | 135.62 | 148.52 | | 173.18 | 184.31 | 200.17 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 96.01 | 104.76 | 113.82 | 123.94 | 131.96 | 143.33 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 106.26 | 116.31 | 125.17 | 134.57 | 143.68 | 155.00 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 6,086.19 | 6,772.03 | 7,445.58 | 8,081.68 | 8,649.62 | 9,319.12 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| Kategori | Lapangan Usaha | Peran Sektoral Kabupaten | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| C | Industri Pengolahan | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Konstruksi | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| L | Real Estate | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| P | Jasa Pendidikan | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | | | | | | |

| Kategori | Lapangan Usaha | Produk Domestik Regional Bruto | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 13,661,800.76 | 14,432,993.60 | 15,192,598.76 | 15,457,882.04 | 16,072,420.77 | 16,601,901.88 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 51,011,146.42 | 49,579,812.96 | 52,911,360.98 | 59,840,372.51 | 62,174,059.72 | 68,712,299.70 |
| C | Industri Pengolahan | 2,299,670.68 | 2,500,125.12 | 2,594,318.94 | 2,710,288.02 | 2,885,410.16 | 3,048,371.65 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 38,232.06 | 41,445.61 | 41,707.81 | 46,654.20 | 48,572.90 | 51,920.50 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 65,339.22 | 69,423.19 | 72,190.82 | 74,626.81 | 79,390.62 | 83,930.14 |
| F | Konstruksi | 11,790,562.10 | 12,800,117.19 | 14,169,447.50 | 15,417,542.10 | 16,215,455.80 | 17,045,729.86 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,031,476.12 | 9,690,708.00 | 10,478,318.24 | 11,202,074.47 | 11,901,553.87 | 12,662,034.07 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,543,954.15 | 5,024,387.13 | 5,506,273.71 | 5,953,889.48 | 6,310,010.91 | 6,825,158.67 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 733,106.79 | 825,282.01 | 887,315.42 | 945,316.85 | 1,002,397.63 | 1,056,636.24 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,269,714.66 | 4,552,997.32 | 4,789,272.94 | 4,952,940.92 | 5,299,285.70 | 5,485,886.54 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,727,308.36 | 1,852,793.71 | 1,901,453.85 | 2,017,043.89 | 2,069,620.99 | 2,180,429.77 |
| L | Real Estate | 2,718,621.64 | 2,938,676.18 | 3,110,768.51 | 3,329,018.10 | 3,515,381.19 | 3,746,188.46 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,300,921.31 | 1,426,419.46 | 1,482,991.10 | 1,567,286.72 | 1,657,680.74 | 1,768,814.27 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,744,145.14 | 10,042,357.60 | 11,135,948.77 | 12,209,755.16 | 12,741,836.12 | 13,239,275.80 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,337,126.10 | 2,511,182.22 | 2,692,623.64 | 2,903,515.34 | 3,064,733.42 | 3,192,964.39 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,668,803.01 | 1,824,986.44 | 1,977,551.47 | 2,137,433.00 | 2,248,583.06 | 2,377,349.19 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,176,890.39 | 1,277,526.21 | 1,367,462.41 | 1,455,452.01 | 1,537,235.46 | 1,650,034.49 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 117,118,818.90 | 121,391,233.95 | 130,311,604.86 | 142,221,091.62 | 148,823,629.06 | 159,728,925.61 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| Kategori | Lapangan Usaha | Peran Sektorial Provinsi | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
| C | Industri Pengolahan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F | Konstruksi | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| L | Real Estate | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| P | Jasa Pendidikan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | | | | | | |

| Kategori | Lapangan Usaha | LQ | | | | | | Rata-rata |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.05 | 2.07 | 2.08 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| C | Industri Pengolahan | 2.80 | 2.62 | 2.56 | 2.61 | 2.53 | 2.51 | 2.61 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 1.08 | 1.16 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3.59 | 3.41 | 3.43 | 3.54 | 3.39 | 3.38 | 3.46 |
| F | Konstruksi | 1.06 | 1.08 | 1.17 | 1.24 | 1.27 | 1.32 | 1.19 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.77 | 1.65 | 1.59 | 1.60 | 1.55 | 1.57 | 1.62 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3.71 | 3.44 | 3.39 | 3.65 | 3.73 | 3.77 | 3.62 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.04 | 1.92 | 1.99 | 2.05 | 2.03 | 2.09 | 2.02 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.51 | 1.46 | 1.48 | 1.57 | 1.55 | 1.62 | 1.53 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 1.01 | 0.96 |
| L | Real Estate | 2.05 | 1.92 | 1.92 | 1.98 | 1.95 | 1.95 | 1.96 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1.61 | 1.64 | 1.77 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 1.82 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.07 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 0.99 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.12 | 1.06 | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 0.89 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.11 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1.74 | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.64 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | | | | | | | |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| Kategori | Lapangan Usaha | LQ | | | | | | SLQ | | SS |
|--------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|----|-------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 2.07 | B | (529,480) |
| B | Pertambangan dan Pengalihan | BSB | BSB | BSB | BSB | BSB | BSB | 0.05 | NB | (6,538,239) |
| C | Industri Pengolahan | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 2.51 | B | (162,960) |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 1.08 | B | (3,347) |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 3.38 | B | (4,538) |
| F | Konstruksi | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 1.32 | B | (830,273) |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 1.57 | B | (760,479) |
| H | Transportasi dan Pergudangan | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 3.77 | B | (515,147) |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 2.09 | B | (54,238) |
| J | Informasi dan Komunikasi | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 1.62 | B | (186,600) |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | BSB | BSB | BSB | BSB | BSB | SB | 1.01 | B | (110,808) |
| L | Real Estate | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 1.95 | B | (230,806) |
| M,N | Jasa Perusahaan | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 2.00 | B | (111,132) |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | SB | SB | BSB | BSB | BSB | SB | 1.01 | B | (497,439) |
| P | Jasa Pendidikan | SB | SB | BSB | SB | SB | SB | 1.07 | B | (128,230) |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 1.03 | B | (128,765) |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | SB | SB | SB | SB | SB | SB | 1.61 | B | (112,798) |
| Produk Domestik Regional Bruto | | | | | | | | | | |

| DLQ | H5-G5 | G5:G22 | (H5-G5)/G5:G22 | Pertumbuhan PDRB |
|----------|--------|---------|----------------|------------------|
| 0.601713 | 89.30 | 1917.38 | 0.05 | 0.0774022443 |
| 0.332251 | 4.60 | 178.87 | 0.03 | |
| 0.665253 | 21.88 | 424.92 | 0.05 | |
| -0.15566 | (0.04) | 3.32 | (0.01) | |
| 0.760458 | 0.92 | 15.63 | 0.06 | |
| 1.248921 | 115.66 | 1196.45 | 0.10 | |
| 1.044118 | 86.80 | 1074.03 | 0.08 | |
| 1.255366 | 133.03 | 1369.07 | 0.10 | |
| 1.121494 | 10.29 | 118.54 | 0.09 | |
| 1.111234 | 41.02 | 476.91 | 0.09 | |
| 1.198684 | 10.86 | 117.05 | 0.09 | |
| 0.93459 | 28.82 | 398.40 | 0.07 | |
| 1.200671 | 17.56 | 188.95 | 0.09 | |
| 1.277979 | 70.24 | 710.08 | 0.10 | |
| 1.111734 | 15.86 | 184.31 | 0.09 | |
| 1.113178 | 11.37 | 131.96 | 0.09 | |
| 1.01788 | 11.32 | 143.68 | 0.08 | |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

B. Perhitungan *Shift Share*

| PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Tahun 2017-2018 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2017 | 2018 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,917.38 | 2,006.68 | 89.30 | 0.047 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 178.87 | 183.47 | 4.60 | 0.026 |
| C | Industri Pengolahan | 424.92 | 446.80 | 21.88 | 0.051 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 3.32 | 3.28 | 0.04 | 0.012 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 15.63 | 16.55 | 0.92 | 0.059 |
| F | Konstruksi | 1,196.45 | 1,312.11 | 115.66 | 0.097 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,074.03 | 1,160.83 | 86.80 | 0.081 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,369.07 | 1,502.10 | 133.03 | 0.097 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 118.54 | 128.83 | 10.29 | 0.087 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 476.91 | 517.93 | 41.02 | 0.086 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 117.05 | 127.91 | 10.86 | 0.093 |
| L | Real Estate | 398.40 | 427.22 | 28.82 | 0.072 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 188.95 | 206.51 | 17.56 | 0.093 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 710.08 | 780.32 | 70.24 | 0.099 |
| P | Jasa Pendidikan | 184.31 | 200.17 | 15.86 | 0.086 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 131.96 | 143.33 | 11.37 | 0.086 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 143.68 | 155.00 | 11.32 | 0.079 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 8,649.62 | 9,319.12 | 669.50 | 0.077 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Tahun 2017-2018 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2017 | 2018 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 16,072,420.77 | 16,601,901.88 | 529,481.11 | 0.033 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 62,174,059.72 | 68,712,299.70 | 6,538,239.98 | 0.105 |
| C | Industri Pengolahan | 2,885,410.16 | 3,048,371.65 | 162,961.49 | 0.056 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 48,572.90 | 51,920.50 | 3,347.60 | 0.069 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 79,390.62 | 83,930.14 | 4,539.52 | 0.057 |
| F | Konstruksi | 16,215,455.80 | 17,045,729.86 | 830,274.06 | 0.051 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11,901,553.87 | 12,662,034.07 | 760,480.20 | 0.064 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6,310,010.91 | 6,825,158.67 | 515,147.76 | 0.082 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,002,397.63 | 1,056,636.24 | 54,238.61 | 0.054 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 5,299,285.70 | 5,485,886.54 | 186,600.84 | 0.035 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,069,620.99 | 2,180,429.77 | 110,808.78 | 0.054 |
| L | Real Estate | 3,515,381.19 | 3,746,188.46 | 230,807.27 | 0.066 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,657,680.74 | 1,768,814.27 | 111,133.53 | 0.067 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 12,741,836.12 | 13,239,275.80 | 497,439.68 | 0.039 |
| P | Jasa Pendidikan | 3,064,733.42 | 3,192,964.39 | 128,230.97 | 0.042 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,248,583.06 | 2,377,349.19 | 128,766.13 | 0.057 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,537,235.46 | 1,650,034.49 | 112,799.03 | 0.073 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 148,823,629.06 | 159,728,925.61 | 10,905,296.55 | 0.073 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | Perhitungan Shift-Share | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|--|
| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) | |
| | | E'ij - Eij | Eij x rn | Eij(rin-rn) | Eij(rij-rin) | Nij + Mij + Cij = E5 | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 89.30 | 140.50 | (77.33) | 26.13 | 89.30 | |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 4.60 | 13.11 | 5.70 | (14.21) | 4.60 | |
| C | Industri Pengolahan | 21.88 | 31.14 | (7.14) | (2.12) | 21.88 | |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.04 | 0.24 | (0.01) | (0.19) | 0.04 | |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.92 | 1.15 | (0.25) | 0.03 | 0.92 | |
| F | Konstruksi | 115.66 | 87.67 | (26.41) | 54.40 | 115.66 | |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 86.80 | 78.70 | (10.07) | 18.17 | 86.80 | |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 133.03 | 100.32 | 11.45 | 21.26 | 133.03 | |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10.29 | 8.69 | (2.27) | 3.88 | 10.29 | |
| J | Informasi dan Komunikasi | 41.02 | 34.95 | (18.15) | 24.23 | 41.02 | |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 10.86 | 8.58 | (2.31) | 4.59 | 10.86 | |
| L | Real Estate | 28.82 | 29.19 | (3.04) | 2.66 | 28.82 | |
| M,N | Jasa Perusahaan | 17.56 | 13.85 | (1.18) | 4.89 | 17.56 | |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 70.24 | 52.03 | (24.31) | 42.52 | 70.24 | |
| P | Jasa Pendidikan | 15.86 | 13.51 | (5.79) | 8.15 | 15.86 | |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 11.37 | 9.67 | (2.11) | 3.81 | 11.37 | |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 11.32 | 10.53 | 0.01 | 0.78 | 11.32 | |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 669.57 | 633.81 | (163.22) | 198.98 | 669.57 | |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tahun 2016-2017 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2016 | 2017 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,840.34 | 1,917.38 | 77.04 | 0.042 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 177.35 | 178.87 | 1.52 | 0.009 |
| C | Industri Pengolahan | 402.54 | 424.92 | 22.38 | 0.056 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 3.18 | 3.32 | 0.14 | 0.044 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 15.01 | 15.63 | 0.62 | 0.041 |
| F | Konstruksi | 1,089.33 | 1,196.45 | 107.12 | 0.098 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,017.72 | 1,074.03 | 56.31 | 0.055 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,234.77 | 1,369.07 | 134.30 | 0.109 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 110.24 | 118.54 | 8.30 | 0.075 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 441.90 | 476.91 | 35.01 | 0.079 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 112.81 | 117.05 | 4.24 | 0.038 |
| L | Real Estate | 374.22 | 398.40 | 24.18 | 0.065 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 172.90 | 188.95 | 16.05 | 0.093 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 658.13 | 710.08 | 51.95 | 0.079 |
| P | Jasa Pendidikan | 173.18 | 184.31 | 11.13 | 0.064 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 123.94 | 131.96 | 8.02 | 0.065 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 134.57 | 143.68 | 9.11 | 0.068 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 8,081.68 | 8,649.62 | 567.94 | 0.070 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Tahun 2016-2017 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2016 | 2017 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 15,457,882.04 | 16,072,420.77 | 614,538.73 | 0.040 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 59,840,372.51 | 62,174,059.72 | 2,333,687.21 | 0.039 |
| C | Industri Pengolahan | 2,710,288.02 | 2,885,410.16 | 175,122.14 | 0.065 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 46,654.20 | 48,572.90 | 1,918.70 | 0.041 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 74,626.81 | 79,390.62 | 4,763.81 | 0.064 |
| F | Konstruksi | 15,417,542.10 | 16,215,455.80 | 797,913.70 | 0.052 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11,202,074.47 | 11,901,553.87 | 699,479.40 | 0.062 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5,953,889.48 | 6,310,010.91 | 356,121.43 | 0.060 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 945,316.85 | 1,002,397.63 | 57,080.78 | 0.060 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,952,940.92 | 5,299,285.70 | 346,344.78 | 0.070 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,017,043.89 | 2,069,620.99 | 52,577.10 | 0.026 |
| L | Real Estate | 3,329,018.10 | 3,515,381.19 | 186,363.09 | 0.056 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,567,286.72 | 1,657,680.74 | 90,394.02 | 0.058 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 12,209,755.16 | 12,741,836.12 | 532,080.96 | 0.044 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,903,515.34 | 3,064,733.42 | 161,218.08 | 0.056 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,137,433.00 | 2,248,583.06 | 111,150.06 | 0.052 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,455,452.01 | 1,537,235.46 | 81,783.45 | 0.056 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 142,221,091.62 | 148,823,629.06 | 6,602,537.44 | 0.046 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| Tahun 2015-2016 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2015 | 2016 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,807.38 | 1,840.34 | 32.96 | 0.018 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 176.95 | 177.35 | 0.40 | 0.002 |
| C | Industri Pengolahan | 380.11 | 402.54 | 22.43 | 0.059 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.69 | 3.18 | 0.49 | 0.182 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 14.15 | 15.01 | 0.86 | 0.061 |
| F | Konstruksi | 944.44 | 1,089.33 | 144.89 | 0.153 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 950.92 | 1,017.72 | 66.80 | 0.070 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,066.63 | 1,234.77 | 168.14 | 0.158 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 100.66 | 110.24 | 9.58 | 0.095 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 405.21 | 441.90 | 36.69 | 0.091 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 103.41 | 112.81 | 9.40 | 0.091 |
| L | Real Estate | 340.40 | 374.22 | 33.82 | 0.099 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 150.27 | 172.90 | 22.63 | 0.151 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 604.03 | 658.13 | 54.10 | 0.090 |
| P | Jasa Pendidikan | 159.26 | 173.18 | 13.92 | 0.087 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 113.82 | 123.94 | 10.12 | 0.089 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 125.17 | 134.57 | 9.40 | 0.075 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 7,445.58 | 8,081.68 | 636.10 | 0.085 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | Perhitungan Shift-Share | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) |
| | | $E'_{ij} - E_{ij}$ | $E_{ij} \times r_n$ | $E_{ij}(r_{in}-r_n)$ | $E_{ij}(r_{ij}-r_{in})$ | $N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} = E_{ij}$ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 77.04 | 85.44 | (12.27) | 3.88 | 77.04 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1.52 | 8.23 | (1.32) | (5.40) | 1.52 |
| C | Industri Pengolahan | 22.38 | 18.69 | 7.32 | (3.63) | 22.38 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.14 | 0.15 | (0.02) | 0.01 | 0.14 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.62 | 0.70 | 0.26 | (0.34) | 0.62 |
| F | Konstruksi | 107.12 | 50.57 | 5.81 | 50.74 | 107.12 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 56.31 | 47.25 | 16.30 | (7.24) | 56.31 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 134.30 | 57.32 | 16.53 | 60.44 | 134.30 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8.30 | 5.12 | 1.54 | 1.64 | 8.30 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 35.01 | 20.51 | 10.39 | 4.11 | 35.01 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.24 | 5.24 | (2.30) | 1.30 | 4.24 |
| L | Real Estate | 24.18 | 17.37 | 3.58 | 3.23 | 24.18 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 16.05 | 8.03 | 1.95 | 6.08 | 16.05 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 51.95 | 30.55 | (1.87) | 23.27 | 51.95 |
| P | Jasa Pendidikan | 11.13 | 8.04 | 1.58 | 1.51 | 11.13 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8.02 | 5.75 | 0.69 | 1.57 | 8.02 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 9.11 | 6.25 | 1.31 | 1.55 | 9.11 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 567.42 | 375.21 | 49.47 | 142.74 | 567.42 |

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Tahun 2015-2016 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2015 | 2016 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 15,192,598.76 | 15,457,882.04 | 265,283.28 | 0.017 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 52,911,360.98 | 59,840,372.51 | 6,929,011.53 | 0.131 |
| C | Industri Pengolahan | 2,594,318.94 | 2,710,288.02 | 115,969.08 | 0.045 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 41,707.81 | 46,654.20 | 4,946.39 | 0.119 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 72,190.82 | 74,626.81 | 2,435.99 | 0.034 |
| F | Konstruksi | 14,169,447.50 | 15,417,542.10 | 1,248,094.60 | 0.088 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,478,318.24 | 11,202,074.47 | 723,756.23 | 0.069 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5,506,273.71 | 5,953,889.48 | 447,615.77 | 0.081 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 887,315.42 | 945,316.85 | 58,001.43 | 0.065 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,789,272.94 | 4,952,940.92 | 163,667.98 | 0.034 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,901,453.85 | 2,017,043.89 | 115,590.04 | 0.061 |
| L | Real Estate | 3,110,768.51 | 3,329,018.10 | 218,249.59 | 0.070 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,482,991.10 | 1,567,286.72 | 84,295.62 | 0.057 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 11,135,948.77 | 12,209,755.16 | 1,073,806.39 | 0.096 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,692,623.64 | 2,903,515.34 | 210,891.70 | 0.078 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,977,551.47 | 2,137,433.00 | 159,881.53 | 0.081 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,367,462.41 | 1,455,452.01 | 87,989.60 | 0.064 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 130,311,604.86 | 142,221,091.62 | 11,909,486.76 | 0.091 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | Perhitungan Shift-Share | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) |
| | | E ⁱ j - E _j | E _j x r _n | E _j (r _n -r _n) | E _j (r _i -r _n) | Nij + Mij + Cij = E ⁱ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 32.96 | 165.18 | (133.62) | 1.40 | 32.96 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.40 | 16.17 | 7.00 | (22.77) | 0.40 |
| C | Industri Pengolahan | 22.43 | 34.74 | (17.75) | 5.44 | 22.43 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.49 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.49 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.86 | 1.29 | (0.82) | 0.38 | 0.86 |
| F | Konstruksi | 144.89 | 86.31 | (3.13) | 61.70 | 144.89 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 66.80 | 86.91 | (21.23) | 1.12 | 66.80 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 168.14 | 97.48 | (10.77) | 81.43 | 168.14 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.58 | 9.20 | (2.62) | 3.00 | 9.58 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 36.69 | 37.03 | (23.19) | 22.84 | 36.69 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9.40 | 9.45 | (3.16) | 3.11 | 9.40 |
| L | Real Estate | 33.82 | 31.11 | (7.23) | 9.94 | 33.82 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 22.63 | 13.73 | (5.19) | 14.09 | 22.63 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 54.10 | 55.20 | 3.04 | (4.14) | 54.10 |
| P | Jasa Pendidikan | 13.92 | 14.56 | (2.08) | 1.45 | 13.92 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10.12 | 10.40 | (1.20) | 0.92 | 10.12 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 9.40 | 11.44 | (3.39) | 1.35 | 9.40 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 636.63 | 680.46 | (225.25) | 181.42 | 636.63 |

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tahun 2014-2015 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2014 | 2015 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,655.60 | 1,807.38 | 151.78 | 0.092 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 175.03 | 176.95 | 1.92 | 0.011 |
| C | Industri Pengolahan | 365.05 | 380.11 | 15.06 | 0.041 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.68 | 2.69 | 0.01 | 0.004 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13.22 | 14.15 | 0.93 | 0.070 |
| F | Konstruksi | 772.39 | 944.44 | 172.05 | 0.223 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 889.70 | 950.92 | 61.22 | 0.069 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 963.88 | 1,066.63 | 102.75 | 0.107 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 88.61 | 100.66 | 12.05 | 0.136 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 371.25 | 405.21 | 33.96 | 0.091 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 97.51 | 103.41 | 5.90 | 0.061 |
| L | Real Estate | 314.08 | 340.40 | 26.32 | 0.084 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 130.30 | 150.27 | 19.97 | 0.153 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 563.05 | 604.03 | 40.98 | 0.073 |
| P | Jasa Pendidikan | 148.52 | 159.26 | 10.74 | 0.072 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 104.76 | 113.82 | 9.06 | 0.086 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 116.31 | 125.17 | 8.86 | 0.076 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 6,772.03 | 7,445.58 | 673.55 | 0.099 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Tahun 2014-2015 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2014 | 2015 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 14,432,993.60 | 15,192,598.76 | 759,605.16 | 0.053 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 49,579,812.96 | 52,911,360.98 | 3,331,548.02 | 0.067 |
| C | Industri Pengolahan | 2,500,125.12 | 2,594,318.94 | 94,193.82 | 0.038 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 41,445.61 | 41,707.81 | 262.20 | 0.006 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 69,423.19 | 72,190.82 | 2,767.63 | 0.040 |
| F | Konstruksi | 12,800,117.19 | 14,169,447.50 | 1,369,330.31 | 0.107 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,690,708.00 | 10,478,318.24 | 787,610.24 | 0.081 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 5,024,387.13 | 5,506,273.71 | 481,886.58 | 0.096 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 825,282.01 | 887,315.42 | 62,033.41 | 0.075 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,552,997.32 | 4,789,272.94 | 236,275.62 | 0.052 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,852,793.71 | 1,901,453.85 | 48,660.14 | 0.026 |
| L | Real Estate | 2,938,676.18 | 3,110,768.51 | 172,092.33 | 0.059 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,426,419.46 | 1,482,991.10 | 56,571.64 | 0.040 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 10,042,357.60 | 11,135,948.77 | 1,093,591.17 | 0.109 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,511,182.22 | 2,692,623.64 | 181,441.42 | 0.072 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,824,986.44 | 1,977,551.47 | 152,565.03 | 0.084 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,277,526.21 | 1,367,462.41 | 89,936.20 | 0.070 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 121,391,233.95 | 130,311,604.86 | 8,920,370.91 | 0.073 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | Perhitungan Shift-Share | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) |
| | | $E'ij - Eij$ | $Eij \times rn$ | $Eij(rin-rn)$ | $Eij(rij-rin)$ | $Nij + Mij + Cij = E5$ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 151.78 | 121.66 | (34.53) | 64.65 | 151.78 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1.92 | 12.86 | (1.10) | (9.84) | 1.92 |
| C | Industri Pengolahan | 15.06 | 26.83 | (13.07) | 1.31 | 15.06 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.01 | 0.20 | (0.18) | (0.01) | 0.01 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.93 | 0.97 | (0.44) | 0.40 | 0.93 |
| F | Konstruksi | 172.05 | 56.76 | 25.87 | 89.42 | 172.05 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 61.22 | 65.38 | 6.93 | (11.09) | 61.22 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 102.75 | 70.83 | 21.62 | 10.30 | 102.75 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 12.05 | 6.51 | 0.15 | 5.39 | 12.05 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 33.96 | 27.28 | (8.02) | 14.69 | 33.96 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5.90 | 7.17 | (4.60) | 3.34 | 5.90 |
| L | Real Estate | 26.32 | 23.08 | (4.69) | 7.93 | 26.32 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 19.97 | 9.58 | (4.41) | 14.80 | 19.97 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 40.98 | 41.38 | 19.94 | (20.33) | 40.98 |
| P | Jasa Pendidikan | 10.74 | 10.91 | (0.18) | 0.01 | 10.74 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9.06 | 7.70 | 1.06 | 0.30 | 9.06 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 8.86 | 8.55 | (0.36) | 0.67 | 8.86 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 673.56 | 497.63 | 3.98 | 171.94 | 673.56 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Kabupaten Jayapura Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tahun 2013-2014 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2013 | 2014 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,487.83 | 1,655.60 | 167.77 | 0.113 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 173.84 | 175.03 | 1.19 | 0.007 |
| C | Industri Pengolahan | 334.95 | 365.05 | 30.10 | 0.090 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.41 | 2.68 | 0.27 | 0.112 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 12.18 | 13.22 | 1.04 | 0.085 |
| F | Konstruksi | 650.01 | 772.39 | 122.38 | 0.188 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 828.65 | 889.70 | 61.05 | 0.074 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 875.25 | 963.88 | 88.63 | 0.101 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 77.79 | 88.61 | 10.82 | 0.139 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 334.57 | 371.25 | 36.68 | 0.110 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 83.40 | 97.51 | 14.11 | 0.169 |
| L | Real Estate | 289.95 | 314.08 | 24.13 | 0.083 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 109.06 | 130.30 | 21.24 | 0.195 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 488.33 | 563.05 | 74.72 | 0.153 |
| P | Jasa Pendidikan | 135.62 | 148.52 | 12.90 | 0.095 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 96.01 | 104.76 | 8.75 | 0.091 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 106.26 | 116.31 | 10.05 | 0.095 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 6,086.19 | 6,772.03 | 685.84 | 0.113 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan 2010 | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Tahun 2013-2014 | | | | | |
| Kategori | Lapangan Usaha | PDRB | | Δ Absolut | Δ Persentase |
| | | 2013 | 2014 | | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 13,661,800.76 | 14,432,993.60 | 771,192.84 | 0.056 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 51,011,146.42 | 49,579,812.96 | 1,431,333.46 | 0.028 |
| C | Industri Pengolahan | 2,299,670.68 | 2,500,125.12 | 200,454.44 | 0.087 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 38,232.06 | 41,445.61 | 3,213.55 | 0.084 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 65,339.22 | 69,423.19 | 4,083.97 | 0.063 |
| F | Konstruksi | 11,790,562.10 | 12,800,117.19 | 1,009,555.09 | 0.086 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9,031,476.12 | 9,690,708.00 | 659,231.88 | 0.073 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,543,954.15 | 5,024,387.13 | 480,432.98 | 0.106 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 733,106.79 | 825,282.01 | 92,175.22 | 0.126 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 4,269,714.66 | 4,552,997.32 | 283,282.66 | 0.066 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,727,308.36 | 1,852,793.71 | 125,485.35 | 0.073 |
| L | Real Estate | 2,718,621.64 | 2,938,676.18 | 220,054.54 | 0.081 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1,300,921.31 | 1,426,419.46 | 125,498.15 | 0.096 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,744,145.14 | 10,042,357.60 | 1,298,212.46 | 0.148 |
| P | Jasa Pendidikan | 2,337,126.10 | 2,511,182.22 | 174,056.12 | 0.074 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,668,803.01 | 1,824,986.44 | 156,183.43 | 0.094 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,176,890.39 | 1,277,526.21 | 100,635.82 | 0.086 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 117,118,818.90 | 121,391,233.95 | 4,272,415.05 | 0.036 |

*Petrus Peleng Roreng, Oktavianus Pasoloran,
Natalia Paranoan*

*Indeks Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Jayapura 2019*

| | | Perhitungan Shift-Share | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Kategori | Lapangan Usaha | Dij | Nij (RS) | Mij (PS) | Cij (DS) | Cross check(Dij) |
| | | $E_{ij} - E_j$ | $E_j \times r_n$ | $E_j(r_{in} - r_n)$ | $E_j(r_{ij} - r_{in})$ | $N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} = E_j$ |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 167.77 | 54.28 | 29.71 | 83.78 | 167.77 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1.19 | 6.34 | (1.46) | (3.69) | 1.19 |
| C | Industri Pengolahan | 30.10 | 12.22 | 16.98 | 0.90 | 30.10 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.27 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1.04 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 1.04 |
| F | Konstruksi | 122.38 | 23.71 | 31.94 | 66.72 | 122.38 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 61.05 | 30.23 | 30.26 | 0.56 | 61.05 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 88.63 | 31.93 | 60.61 | (3.91) | 88.63 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10.82 | 2.84 | 6.94 | 1.04 | 10.82 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 36.68 | 12.20 | 9.99 | 14.48 | 36.68 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 14.11 | 3.04 | 3.02 | 8.05 | 14.11 |
| L | Real Estate | 24.13 | 10.58 | 12.89 | 0.66 | 24.13 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 21.24 | 3.98 | 6.54 | 10.72 | 21.24 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 74.72 | 17.81 | 54.69 | 2.22 | 74.72 |
| P | Jasa Pendidikan | 12.90 | 4.95 | 5.15 | 2.80 | 12.90 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8.75 | 3.50 | 5.48 | (0.24) | 8.75 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 10.05 | 3.88 | 5.21 | 0.96 | 10.05 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 685.83 | 222.02 | 278.39 | 185.42 | 685.83 |